



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016 - 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan *pembangunan di Daerah*.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Gizi adalah zat atau senyawa ikatan kimia yang terdapat dalam pangan, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya serta bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Pasal 2

RAD-PG Daerah Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya pembangunan Pangan dan Gizi dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

BAB II RAD-PG

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG Daerah Tahun 2016 – 2021, terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Rencana Aksi Multi Sektor;
 - c. BAB III : *Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi*;
 - d. BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - e. BAB V : *Penutup*.
- (2) Sistematika RAD – PG Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan sebagai instrumen sinergi berbagai lembaga di Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan Pangan dan Gizi.

**BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG Daerah Tahun 2016-2021.
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Mei 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURANBUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI
TAHUN 2016-2021.

**RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN GIZI TAHUN 2016-2021.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi di bidang pangan dan gizi, pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang mengamankan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing. Menindaklanjuti amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Penyusunan dokumen ini memerhatikan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan RAN Pangan dan Gizi 2015-2019, RPJMN 2015-2019, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018, serta RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 dan Renstra perangkat daerah Kabupaten Berau 2016-2021 yang terkait.

Kami mengharapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dapat bermanfaat sebagai alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi.

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah di programkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra-SKPD ini di ucapkan terima Kasih.

Tim Penyusun RAD PG Kabupaten Berau



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan	I-3
1.3 Dasar Penyusunan	I-4
1.4 Sistematika	I-5
Bab II PANGAN DAN GIZI SEBAGAI INTERVENSI PEMBANGUNAN	II-1
2.1 Situasi Pangan dan Gizi	II-1
2.1.1 Situasi Pangan	II-1
2.1.2 Situasi Gizi	II-20
2.2 Konsekuensi Pangan dan Gizi Dalam Pembangunan	II-23
2.2.1 Pergeseran Tren Penyakit	II-23
2.2.2 Peran dan Dampak Pangan dan Gizi dalam Pembangunan	II-24
2.3 Kebijakan Daerah Dalam Pembangunan Pangan dan Gizi	II-26
2.3.1 Telaahan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur	II-26
2.3.2 Telaahan RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2006 -2026	II-31
2.3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021	II-31
2.3.4 Kebijakan terkait Konsumsi	II-33
2.3.5 Kebijakan terkait Akses	II-34
2.3.6 Kebijakan terkait Pelayanan Kesehatan	II-35
2.4 Tantangan dan Hambatan Kunci	II-36
2.4.1 Tantangan dan Hambatan Kunci Program Spesifik Gizi secara Langsung	II-36
2.4.2 Tantangan dan Hambatan Kunci Program Sensitif Gizi secara Langsung	II-39



2.4.3 Tantangan dan Hambatan Kunci Program Spesifik dan Sensitif Gizi Secara Tidak Langsung	II-41
BAB III RENCANA AKSI MULTISEKTOR	III-1
3.1 Tujuan	III-1
3.2 Outcome Utama, Output dan Intervensi	III-1
3.3 Prinsip dan Pendekatan Kunci	III-3
3.3.1 Pendekatan Multisektor	III-3
3.3.2 Sensitif Gender	III-4
3.3.3 Kesetaraan	III-7
3.3.4 Keselarasan dengan RPJMD Kab. Berau 2016-2021	III-8
3.4 Penguatan RAD-PG Multisektor	III-11
BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI	IV-1
4.1 Kerangka Kelembagaan	IV-1
4.1.1 Tim Penyusun dan Pembahas RAD PG Kabupaten Berau	IV-1
4.1.2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan	IV-2
4.2 Manajemen Keuangan dan Pendanaan	IV-3
4.3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan	IV-3
4.4 Strategi Pengembangan Kapasitas	IV-4
4.5 Strategi Advokasi dan Komunikasi	IV-5
4.6 Pendanaan Indikatif	IV-6
4.7 Strategi Pemantauan dan Evaluasi	IV-6
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
5.1 Pelaksanaan	V-1
5.2 Tujuan	V-2
5.3 Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	V-2
5.4 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi	V-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase rata-rata konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok makanan Kabupaten Berau Tahun 2012–2016	II-7
Tabel 2.2	Konsumsi Produk Peternakan di Kabupaten Berau Tahun 2011–2015	II-9
Tabel 2.3	Data Perkembangan Harga Eceran Rata - Rata Bahan Pangan Kabupaten Berau tahun 2013 - 2017 (Rp/Kg)	II-11
Tabel 2.4	Jumlah Desa Prioritas Kerentanan dan Kerawanan Pangan Kab. Berau Tahun 2016	II-14
Tabel 2.5	Jumlah Pengujian Sampel Pangan Segar Kab. Berau tahun 2016 - 2021	II-15
Tabel 2.6	Jenis Kejadian Luar Biasa Kab. Berau Tahun 2016	II-17
Tabel 2.7	Jumlah Ruang UKS se-Kabupaten Berau	II-20
Tabel 2.8	Indikator untuk Evaluasi Pengembangan Ketahanan Pangan dan Gizi	II-26
Tabel 2.9	Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya tahun 2016	II-36
Tabel 2.10	Tantangan dan Hambatan Kunci Program Spesifik Gizi	II-37
Tabel 2.11	Tantangan dan Hambatan Kunci Program Sensitif Gizi	II-40
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021	III-2
Tabel 3.2	Indikator dan Sasaran Pangan	III-2
Tabel 3.3	Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi	III-2
Tabel 3.4	Kondisi Kelembagaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Berau	III-12
Tabel 5.1	Daftar Kegiatan RAD-PG Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 yang Dimonitoring dan Evaluasi	V-3
Tabel 5.2	Matriks Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021	V-30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ketersediaan energi Kabupaten Berau pada Tahun 2013-2017	II-3
Gambar 2.2	Ketersediaan protein Kabupaten Berau Tahun 2013-2017	II-3
Gambar 2.3	Perkembangan Ketersediaan Energi Kabupaten Berau tahun 2013 - 2017	II-4
Gambar 2.4	Perkembangan Ketersediaan Protein Kabupaten Berau tahun 2013 - 2017	II-4
Gambar 2.5	Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Kabupaten Berau Tahun 2013 – 2017	II-6
Gambar 2.6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015	II-8
Gambar 2.7	Pemenuhan Konsumsi Beras Kabupaten Berau Tahun 2013 – 2017 (Ton)	II-10
Gambar 2.8	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita) Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II-12
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Sangat Rawan Pangan (<70% Angka Kecukupan Gizi)Tahun 2013- 2016 Kabupaten Berau	II-13
Gambar 2.10	Persentase Penduduk Rawan Pangan (70-89,9% Angka Kecukupan Gizi)Tahun 2013- 2016 di Kabupaten Berau	II-13
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Tahan Pangan (>90% Angka Kecukupan Gizi)Tahun 2013 – 2016 Kabupaten Berau	II-15
Gambar 2.12	Prevalensi Balita Kurang Gizi Kabupaten Berau Tahun 2015 - 2017	II-21
Gambar 2.13	Prevalensi Balita Gizi Buruk (IKK) Kabupaten Berau Tahun 2015 - 2017	II-22
Gambar 2.14	Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak di Kab. Berau tahun 2015 - 2017	II-24
Gambar 2.15	Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang Akibat Gangguan Gizi pada Masa Janin	II-25
Gambar 2.16	Hubungan Antar elemen Visi Kabupaten Berau	II-32
Gambar 3.1	Hubungan Antar elemen Visi Kabupaten Berau	III-1

**RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 - 2021**



Gambar 3.2	Kerangka Pendekatan	III-4
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Gender Prov. Kaltim dan Kab. Berau 2010 – 2015	III-6
Gambar 3.4	Strategi RPJMD Kabupaten Berau 2016 – 2021 terkait Peningkatan Pangan dan Gizi	III-9
Gambar 3.5	Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Berau	III-13



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunannasional ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dicirikan dengan fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pangan dan gizi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara gizi memiliki pengertian zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Pangan dan Gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbale balik, yang artinya bahwa gizi akan menentukan keberhasilan suatu daerah, begitu pula sebaliknya kondisi suatu daerah dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Masalah pangan dan gizi merupakan masalah pokok yang mendasari seluruh kehidupan dan pembangunan daerah. Masalah ini adalah masalah yang harus selalu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah dan kita semua tentunya sebagai



warganegara. Akar permasalahan pangan dan gizi sebenarnya adalah kemiskinan, ketidaktahuan, ketidakpedulian (*ignorance*), distribusi bahan pangan yang buruk. Demikian pentingnya pangan dan gizi bagi kehidupan masyarakat, maka tersedianya harus dapat dijamin dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk pemenuhan aspirasi humanistik masyarakat, yaitu hidup maju, mandiri, dalam suasana tenteram, serta sejahtera lahir dan batin.

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitive dalam dinamika kehidupan sosial politik, sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi Kabupaten Berau untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Kabupaten Berau secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*) dan berkesinambungan (*sustainability*) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai masalah atau kendala. Beberapa hal yang menjadi masalah atau kendala, yaitu:

- a. Masih rendahnya diversifikasi konsumsi pangan beragam yang disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap upaya pemenuhan pangan. Kondisi ini umumnya disebabkan faktor budaya atau kebiasaan serta anggapan bahwa beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat.
- b. Masih terdapatnya kasus Balita Gizi Kurang (*Underweight*), Balita Pendek (*Stunting*), dan Balita Kurus (*wasting*).
- c. Semakin terbatas sumberdaya lahan pertanian sehingga semakin mengancam terpenuhinya ketersediaan pangan dan dilakukannya impor kebutuhan pangan.
- d. Masih kurang optimalnya akses terhadap sumber air minum dan air bersih, serta pengelolaan lingkungan yang sehat.
- e. Kebijakan dan program terkait perbaikan gizi masih terfragmentasi akibat kurangnya koordinasi dan belum dilaksanakannya pendekatan multi-sektor.

Untuk mencapai status perbaikan gizi dan pangan peran pemerintah saja tidak cukup, karena proses pengawasan dan pendanaan yang setingkat nasional tidaklah mudah. Disini peran daerah diperlukan untuk dapat melaksanakan maupun menginovasikan program gizi dan pangan. Pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami permasalahan daerahnya dituntut untuk menginovasikan serta menjalin hubungan kemitraan dengan swasta. Oleh karena itu permasalahan perbaikan gizi



masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi di bidang pangan dan gizi, pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing. Menindaklanjuti amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Penyusunan dokumen ini memerhatikan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan RAN Pangan dan Gizi 2015-2019, RPJMN 2015-2019, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018, serta RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 dan Renstra perangkat daerah Kabupaten Berau 2016-2021 yang terkait.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi. Dokumen RAD Pangan dan Gizi juga ditujukan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran daerah sehingga sesuai dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dalam rangka meningkatkan perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada Ibu pra-hamil, Ibu hamil dan anak, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Sementara tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021:

- a. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen stakeholders untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi daerah.
- b. Menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi daerah.



- c. Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor.
- d. Memberikan panduan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Berau Tahun 2016–2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 54 Tahun 2015 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 520/K.106/2015 tentang Penetapan Kecamatan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura se Kalimantan Timur; dan



11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ... Tahun Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA

Penyajian laporan RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Berau Tahun 2016-2023 terdiri atas 5 bab, meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, dasar hukum penyusunan, dan sistematika laporan RAD Pangan dan Gizi.

Bab II. Pangan dan Gizi Sebagai Intervensi Pembangunan

Bab ini memuat situasi pangan dan gizi, konsekuensi pangan dan gizi dalam pembangunan, kebijakan daerah dalam pembangunan pangan dan gizi, dan tantangan dan hambatan kunci.

Bab III. Rencana Aksi Multisektor

Bab ini memuat tujuan, outcome, output dan intervensi, prinsip dan pendekatan kunci, dan penguatan RAD multisektor.

Bab IV. Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi

Bab ini memuat kerangka kelembagaan, manajemen keuangan dan pendanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, strategi pengembangan kapasitas, strategi advokasi dan komunikasi, pendanaan indikatif, dan strategi monitoring dan evaluasi.

Bab V. Pemantauan dan Evaluasi

Bab ini memuat pelaksanaan dan tujuan pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi.

**BAB
2**

**PANGAN DAN GIZI
SEBAGAI INTERVENSI
PEMBANGUNAN**

2.1 SITUASI PANGAN DAN GIZI

2.1.1 Situasi Pangan

Sebagai bagian dari provinsi yang memiliki tujuan swasembada pangan, Kabupaten Berau diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal dalam memenuhi produksi tanaman pangan baik dengan cara pengembangan lahan atau penggunaan teknologi pertanian tepat guna. Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Berau dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan.

Padi merupakan komoditas tanaman pangan utama yang dibudidayakan oleh para pelaku utama (petani) baik di lahan basah (padi sawah) maupun lahan kering (padi ladang). Pada tahun 2015 ini, produktivitas padi sawah dan ladang di Kabupaten Berau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Luas panen pada tahun 2015 hanya mencapai 12.856 ha dengan produksi 37.441 ton. Hal ini menjadikan produktivitas padinya sebesar 2,91 ton per hektar. Angka ini jauh dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai produksi 43.172 ton dengan produktivitas mencapai 3,14 ton per hektar. Potensi lahan pertanian tersebut, tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Berau, dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan daerah, dan menunjang pangan nasional. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan nasional, dapat ditempuh dengan langkah-langkah pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi lahan rawa dan air tanah.

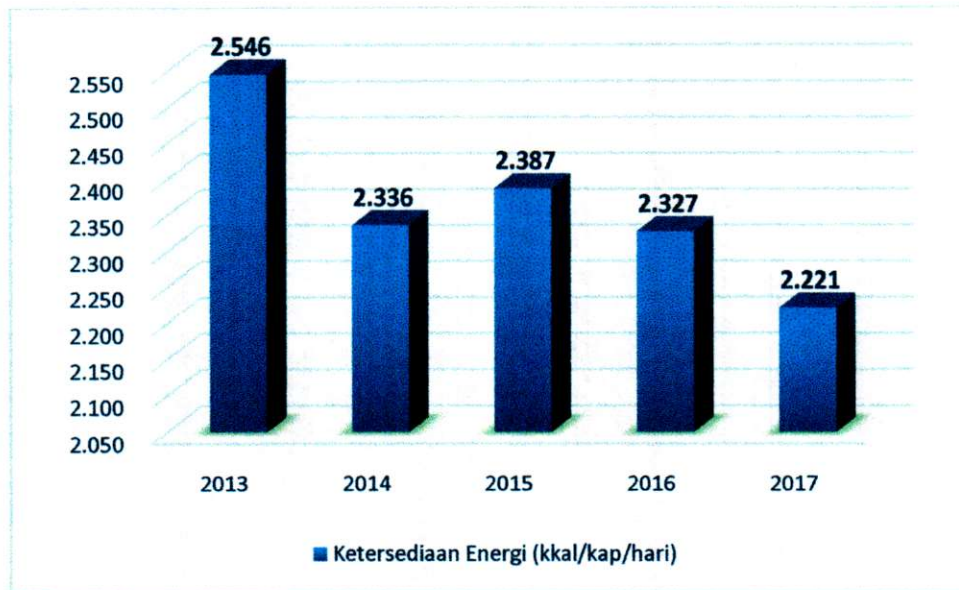
Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan di Kabupaten Berau. Kabupaten

Beraumemiliki kekayaan keragaman hayati, tanaman penghasil buah, tanaman penghasil sayuran, tanaman berumbi, dan tanaman rempah-rempah. Sumber karbohidrat lain seperti: jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu. Beberapa diantaranya dari komoditilokal tersebut yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah di Kabupaten Berau, juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu. Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah. Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian sangat penting, artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaanpangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan.

1. Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individusecara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitaskonsumsi pangan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein.

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa ketersediaan energi di Kabupaten Berau pada tahun 2016 sebesar2.321 kkal/kap/hr berada dibawah kriteria energi minimal 2.400 kkal/kap/hr yangdirekomendasi WNPG X Tahun 2012. Untuk tahun 2017 ketersediaan energi sebesar 2.221 kkal/kap/hr, terjadi penurunan ketersediaan energi, hal ini disebabkan karena adanya penurunan produksi beberapa komoditas pangansumber energidi Kabupaten Berau.

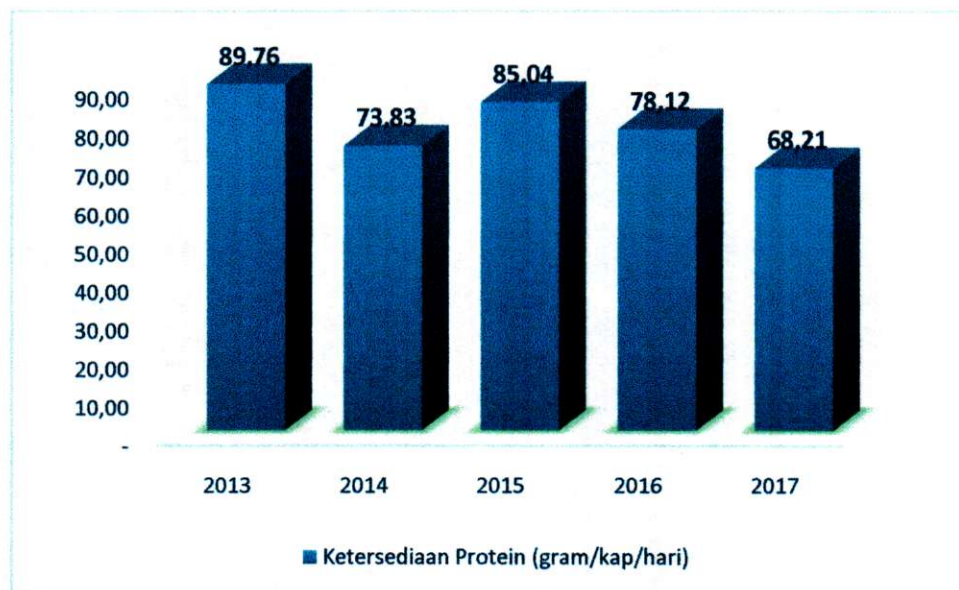


Sumber : Dinas Pangan Kab. Berau, 2018

Gambar 2.1

Ketersediaan Energi Kabupaten Berau pada Tahun 2013-2017

Untuk protein, berdasarkan gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa tingkat ketersediaan protein di Kabupaten Berau sejak tahun 2013 melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPX Tahun 2012 63 gram/kapita/hari untuk protein. Tahun 2016 terjadi penurunan ketersediaan protein, menjadi 78,12 gr/kap/hr, lalu menurun kembali pada tahun 2017 menjadi 68,21 gr/kap/hr.

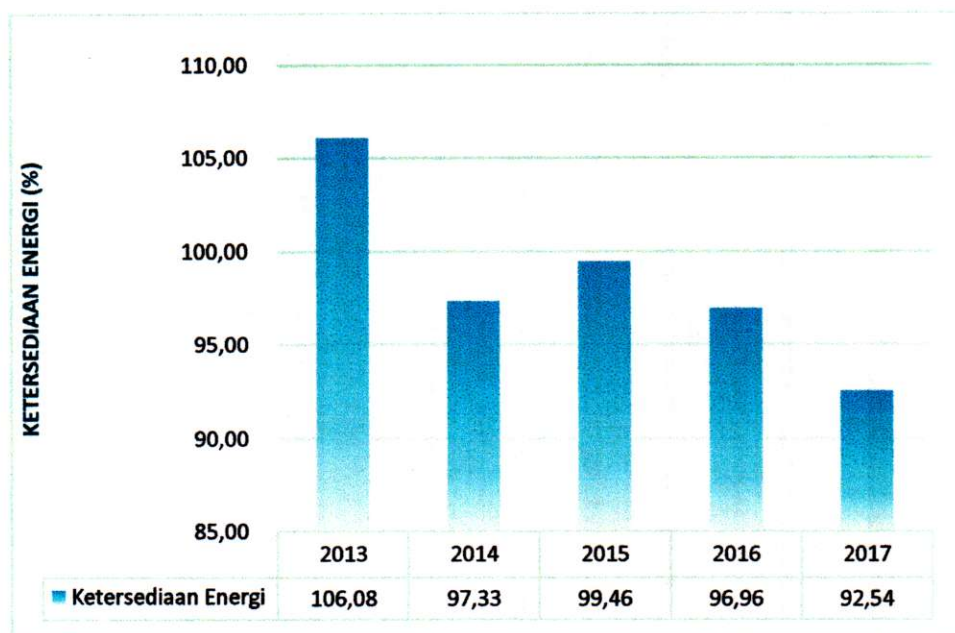


Sumber : Dinas Pangan Kab. Berau, 2018

Gambar 2.2

Ketersediaan Protein Kabupaten Berau Tahun 2013-2017

Untuk persentase ketersediaan energi dan protein dapat dilihat pada gambar berikut:

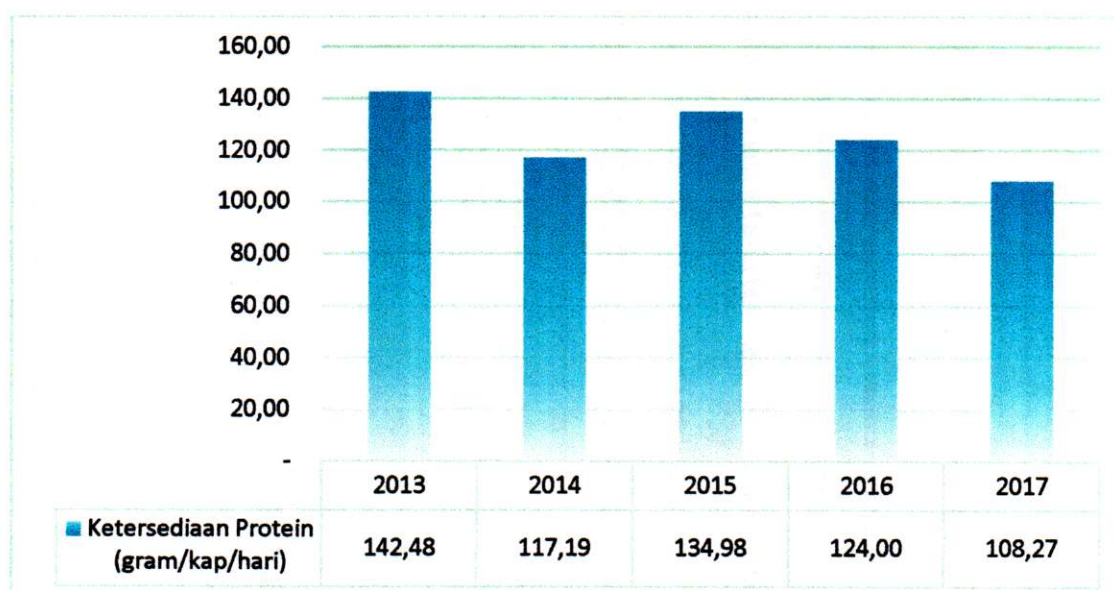


Sumber: Dinas Pangan Kab. Berau, 2018

Gambar 2.3

Perkembangan Ketersediaan Energi Kabupaten Berau tahun 2013 - 2017

Persentase ketersediaan energi tertinggi tercapai pada tahun 2013. Namun angka ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga tahun 2017 persentase ketersediaan energi di Kabupaten Berau mencapai 92,54 persen. Sementara untuk perkembangan ketersediaan protein juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun masih menunjukkan capaian di atas 100 persen seperti dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Dinas Pangan Kab. Berau, 2018

Gambar 2.4

Perkembangan Ketersediaan Protein Kabupaten Berau tahun 2013-2017

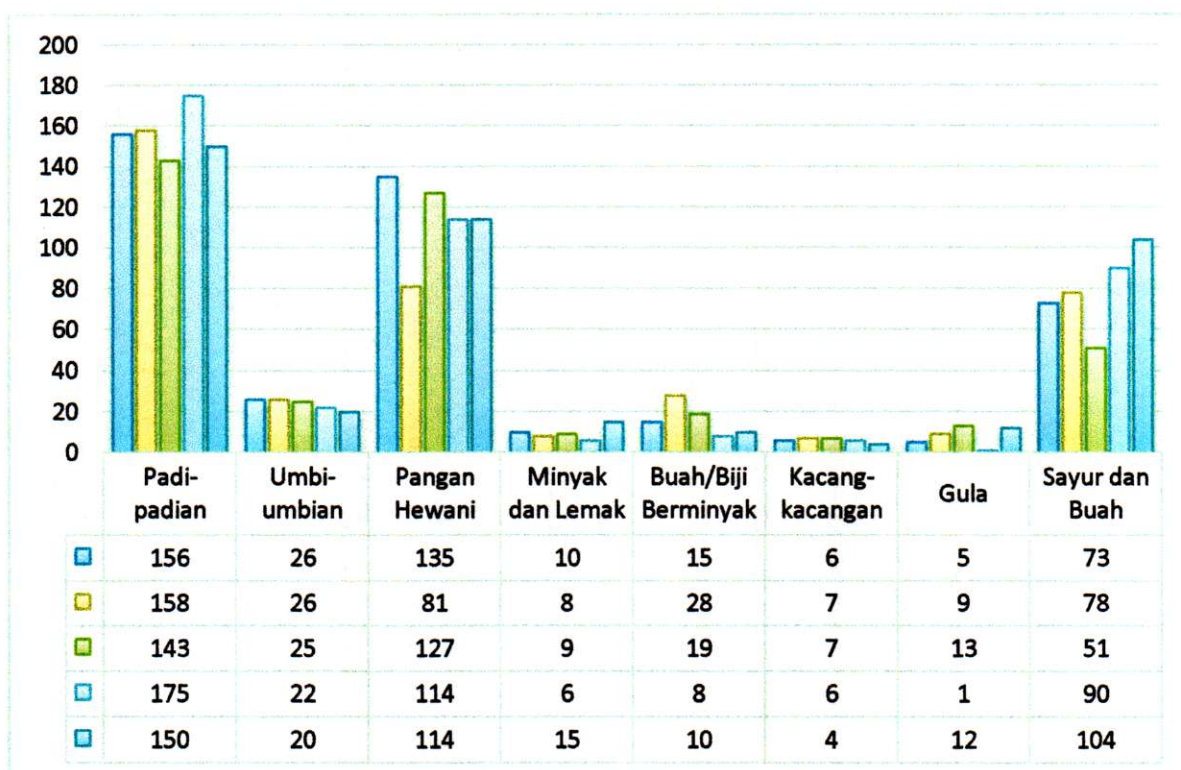
2. Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan

Kabupaten Berau memiliki beberapa peluang dalam peningkatan konsumsi pangan diantaranya adalah dengan adanya kekayaan sumber daya alam yang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi.

Berdasarkan pedoman umum diversifikasi pangan yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional maka kelompok pangan yang dibutuhkan masyarakat meliputi: 1) padi-padian, 2) umbi-umbian, 3) pangan hewani, 4) kacang-kacangan, 5) sayur dan buah, 6) biji berminyak, 7) lemak dan minyak, 8) gula, serta 9) kebutuhan lainnya seperti mineral. Kelompok pangan yang dibutuhkan masyarakat yang pertama adalah padi-padian. Pada tahun 2015 produktivitas padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Berau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk padi ladang, produksi panen juga mengalami penurunan.

Diantara berbagai kelompok pangan tersebut, jagung merupakan kelompok pangan yang memiliki panenterbesar di Kabupaten Berau pada tahun 2015 yaitu mencapai 1.072 ha. Namun, dari sisi produksi yang dihasilkan, yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Berau adalah ubi kayu dengan total produksi pada tahun 2015 sebesar 4.562 ton dengan produktivitas terbesar pula yakni 18,32 ton/ha. Selain itu, kacang hijau di Kabupaten Berau memiliki luas panen dan produksi terkecil yaitu 60 ha dengan produksi 70 ton. Situasi ketersediaan komoditas pangan strategis di Kabupaten Berau ditunjukkan pada gambar grafik berikut:

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**



Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Berau, 2018

Gambar 2.5
Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis
Kabupaten Berau 2013 - 2017

Perkembangan jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi mencerminkan tingkat kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, yang dipengaruhi berbagai faktor seperti pendapatan rumah tangga, ketersediaan bahan pangan yang terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau, serta pemahaman dan tingkat kesadaran gizi masyarakat.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS, pengeluaran rumah tangga dikelompokkan ke dalam pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pola pengeluaran rumah tangga untuk kedua kelompok tersebut merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Persentase rata-rata konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok akanan Kabupaten Berau Tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Persentase Rata-Rata Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan
Kabupaten Berau Tahun 2012 - 2016

No	Kelompok Makanan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Padi-padian	12,38	11,70	12,24	12,05	12,39
2.	Umbi-umbian	0,56	0,66	0,70	0,69	0,84
3.	Ikan/Udang/ Cumi/Kerang	13,25	11,02	12,80	10,14	9,92
4.	Daging	3,21	3,56	4,04	3,77	5,47
5.	Telur dan Susu	9,13	8,19	9,60	7,44	7,99
6.	Sayur-sayuran	6,92	7,96	7,47	7,01	7,26
7.	Kacang-kacangan	2,18	2,11	2,22	1,88	1,87
8.	Buah-buahan	4,99	3,84	5,16	3,22	3,60
9.	Minyak dan Lemak	3,27	3,16	2,99	2,65	2,64
10.	Bahan Minuman	4,90	4,18	3,78	3,82	3,77
11.	Bumbu-bumbuan	2,40	2,76	2,51	2,14	2,40
12.	Konsumsi Lainnya	3,53	3,14	3,25	2,44	2,69
13.	Makanan dan Minuman Jadi	18,50	24,77	19,39	31,12	26,49
14.	Tembakau dan Sirih	14,77	12,97	13,83	11,63	12,66

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Berau, 2016

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2016, kelompok makanan dan minuman jadi masih menempati porsi pengeluaran tertinggi dibanding komoditas makananyang lain meskipun tiap tahunnya persentasenya mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Berau cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan yang siap untuk dikonsumsi. Pilihan mengkonsumsi makanan jadi ini dengan beberapa pertimbangan diantaranya dari sisi kepraktisan dan juga tidak perlu mengolah sendiri sehingga lebih hemat bahan bakar. Hal ini juga dapat dilihat dari semakin banyaknya usaha warung-warung makan maupun warung penjualan sayur masak.

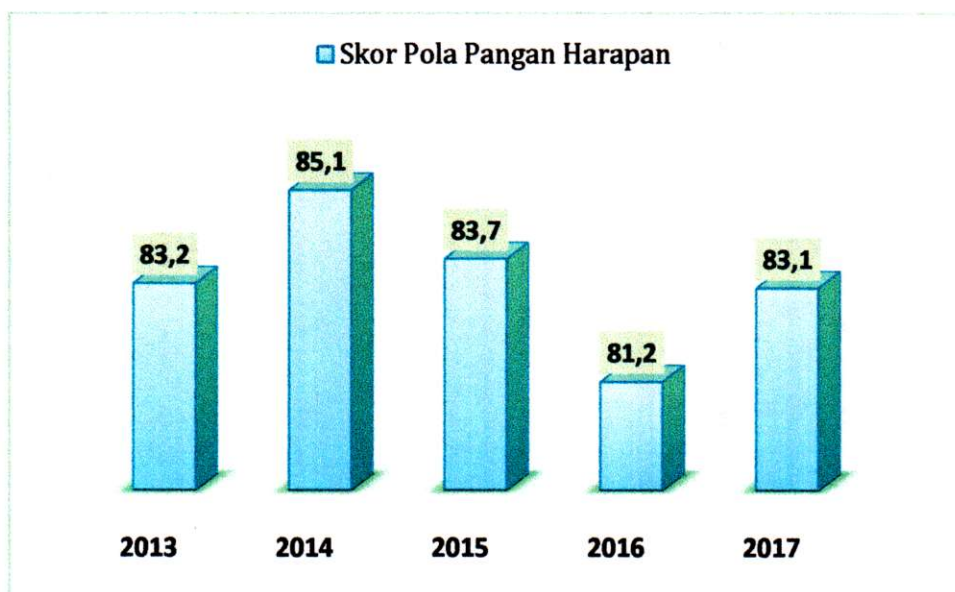
Adapun untuk kelompok makanan yang paling sedikit dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Berau adalah jenis umbi-umbian. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, porsi pengeluaran rumah tangga untuk umbi-umbian tidak pernah lebih dari 1 persen. Hal ini dapat terjadi karena, makanan pokok penduduk Kabupaten Berau adalah nasi sedangkan umbi-umbian hanya sebagai makanan sampingan sehingga jumlah konsumsi umbi-umbian tidak banyak yaitu berada dikisaran banyak yaitu berada dikisaran 0,56 persen sampai dengan 0,84 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir.

3. Perkembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah menetapkan strategi pencapaian dengan kebijakan percepatan penganekaragaman pangan dengan pengembangan produk pangan yang tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan, yang mencakup satu aspek pengolahan distribusi dan keamanan pangan masyarakat.

Pemenuhan konsumsi pangan ditekankan juga pada aspek kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas/keragaman dan keseimbangan gizi yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan, yaitu keseimbangan terpenuhinya kebutuhan makro, agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif dari hari ke hari.

FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”.



Sumber: Dinas Pangan Kab. Berau, 2018

Gambar 2.6
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Berau Tahun 2013-2017

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan tertinggi dicapai pada tahun 2014. Skor PPH mengalami penurunan hingga tahun 2016, namun meningkat kembali menjadi 83,1 pada tahun 2017. Meskipun angka ini belum sebesar pada tahun 2014.

Perkembangan kualitas konsumsi selama 2013-2017 masih belum mencapai kondisi ideal. Belum idealnya kualitas konsumsi pangan ini, terjadi karena pola konsumsi pangan masih tergantung pada padi-padian dan masih kurang dalam hal konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah serta kacang-kacangan.

Salah satu pembentuk gizi seimbang didasarkan pada triguna makanan, salah satunya adalah makanan sebagai sumber zat tenaga atau biasa disebut konsumsi energi penduduk. Pencapaian konsumsi produk peternakan Konsumsi daging dan telur kg/kapita/tahun di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan peningkatan yang fluktuatif pada periode 2009 -2014, dimana tahun 2013 sebanyak 12.10 kg/kapita/tahun dan pada 2014 meningkat 13,12 kg/kapita/tahun. Sedangkan pada konsumsi telur tidak terjadi peningkatan yang signifikan, bukan berarti kurang minat masyarakat pada konsumsi telur tapi stock/persediaan yang masih sangat kurang. Begitu juga minat konsumsi susu di masyarakat juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Gambaran lebih jelas mengenai data konsumsi produk peternakan di Berau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Konsumsi Produk Peternakan di Kabupaten Berau Tahun 2011-2015

Tahun	Daging (Kg/kapital/tahun)	Telur (Kg/kapita/thn)
2011	11.54	8.78
2012	11.82	9.96
2013	12.10	6.31
2014	13.12	7.88
2015	12.12	4.69

Sumber: Renstra Distanak Kab. Berau 2016 -2021

Data produksi daging dan telur diatas adalah sigma dari produk lokal dan pemasukan, karena sumber daya lokal belum bisa memenuhi permintaan produk peternakan yang dibutuhkan masyarakat. Berangkat dari kondisi inilah Dinas Pertaniandan Peternakan Kabupaten Berau pada periode 2016-2020 bertekad untuk:

1. Meningkatkan ketersediaan produk peternakan daging (sapi, kambing, ayam, babi dan itik) dan telur unggas.
2. Menurunkan kasus penyakit strategis ternak.
3. Mewujudkan kampung mandiri energi ramah lingkungan asal kotoran ternak.
4. Meningkatkan promosi produk pangan asal ternak yang *marketable*.

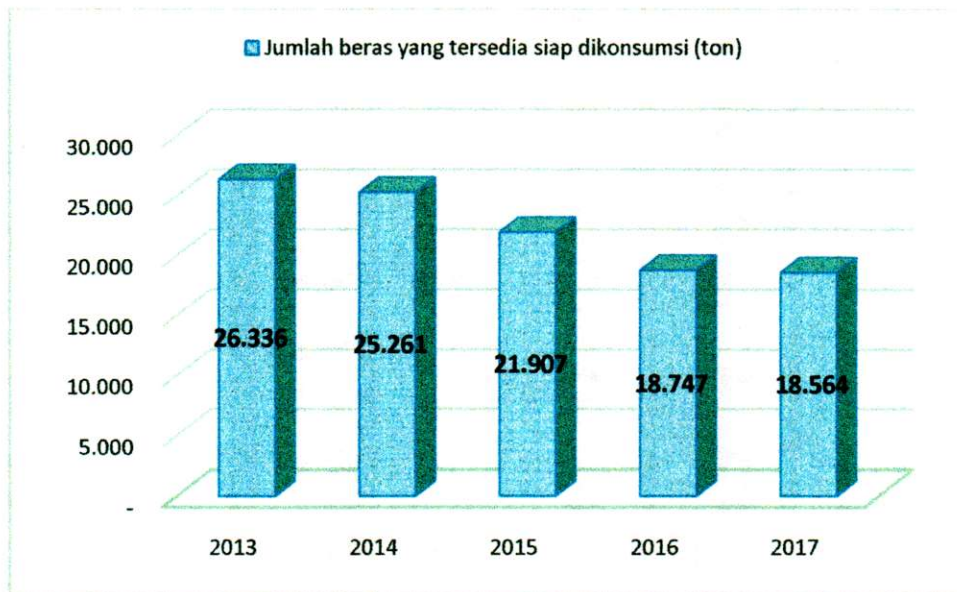
4. Perkembangan Konsumsi Beras dan Pangan Utama

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh Gubernur. Pada tahun 2015 produktivitas padi sawah dan ladang di Kabupaten

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

Berau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Luas panen pada tahun 2015 hanya mencapai 12.856 ha dengan produksi 37.441 ton. Hal ini menjadikan produktivitas padi hanya sebesar 2,91 ton per hektar. Angka ini jauh dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai produksi 43.172 ton dengan produktivitas mencapai 3,14 ton per hektar.

Tahun 2015 Kabupaten Berau merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang telah mencapai swasembada beras sebesar 101,75%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar masing-masing mencapai 240,13% dan 147,31% swasembada beras. Pemenuhan konsumsi beras Kabupaten Berau tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Berau, 2018

Gambar 2.7
Pemenuhan Konsumsi Beras Kabupaten Berau Tahun 2013 - 2017 (Ton)

Beras sebagai barang kebutuhan pokok hasil pertanian. Selain beras, barang kebutuhan pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Jenis Barang Kebutuhan Pokok menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a. beras;
 - b. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c. cabe;
 - d. bawang merah.

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a. gula;
 - b. minyak goreng;
 - c. tepung terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a. daging sapi;
 - b. daging ayam ras;
 - c. telur ayam ras;
 - d. ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau." Berikut disajikan data Perkembangan harga eceran rata-rata bahan pangandi Kabupaten Berau.

Tabel 2.3
Data Perkembangan Harga Eceran Rata - Rata Bahan Pangan Kabupaten Berau tahun 2013 - 2017 (Rp/Kg)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Beras	9.750	10.800	12.125	12.125	11.390
2	Jagung	6.085	5.300	5.700	5.700	4.785
3	Kedelai	7.380	7.380	8.260	8.260	8.810
4	Daging Sapi	95.850	121.200	122.700	122.700	124.565
5	Daging Ayam	28.850	30.000	31.340	31.340	32.125
6	Telur Ayam	21.350	31.000	201.800	18.924	35.400
7	Gula	13.900	13.950	14.600	14.600	15.885
8	Cabe Merah	45.750	48.850	55.350	55.350	47.500
9	Minyak Goreng	14.300	15.975	16.550	16.550	16.585

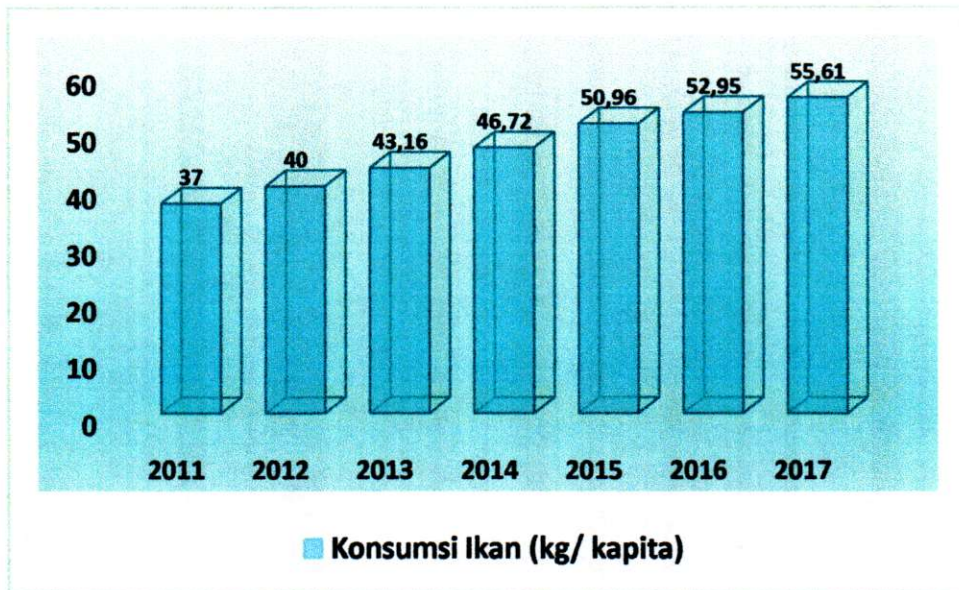
Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Berau, 2018

5. Perkembangan Konsumsi Ikan

Tingkat capaian kinerja konsumsi ikan di Kabupaten Berau menunjukkan pola yang semakin meningkat. Jika pada Tahun 2013 tingkat capaian kinerja mencapai 99,91%, di mana pada tahun 2013 direncanakan tingkat konsumsi ikan sebesar 43,2 kg/perkapita, sedangkan tingkat realisasinya baru mencapai 43,16 kg/perkapita. Sedangkan tahun 2014, tingkat capaian kinerjanya meningkat menjadi 100,04% (sangat berhasil) di mana direncanakan sebesar 46,7 kg/perkapita dengan tingkat

RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BERAU 2016 - 2021

realisasi sebesar 46,72 kg/perkapita. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata tingkat konsumsi ikan perkapita/tahun nasional yang hanya sebesar 29,04 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2017 tingkat konsumsi ikan mengalami kenaikan daripada tahun 2016 menjadi sebesar 55,61 kg/kapita. Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Berau tahun 2011-2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015

Gambar 2.8
Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita) Kabupaten Berau
Tahun 2011-2017

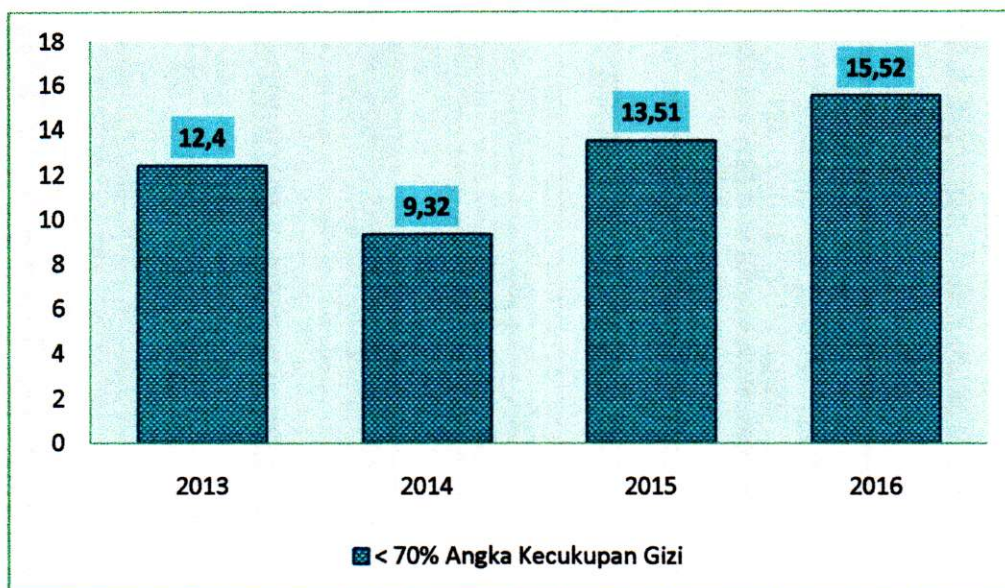
6. Kondisi Rawan Pangan

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan, meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perharidengannilai AKG 2.150 kkal/kap/hari. Klasifikasi tingkat kecukupan gizi berdasarkan angka kecukupan kalori (Depkes, 1996 dan BKP, 2006) sebagai berikut:

- <70% dikategorikan sangat rawan pangan, merupakan defisit energi tingkat berat, yaitu penduduk dengan konsumsi kalori per kapita sehari kurang dari 1400 kkal.
- 70 - 89,99% dikategorikan rawan pangan, merupakan defisit energi tingkat sedang sampai ringan, yaitu penduduk dengan konsumsi kalori per kapita antara 1400 - 1800 kkal.
- > 90% dikategorikan tahan pangan, yaitu penduduk dengan konsumsi kalori per kapita sehari antara >1800 kkal.

Berikut disajikan persentase penduduk dengan kategori sangat rawan pangan, rawan pangan dan tahan pangan di Kabupaten Berau pada tahun 2013 hingga 2016.

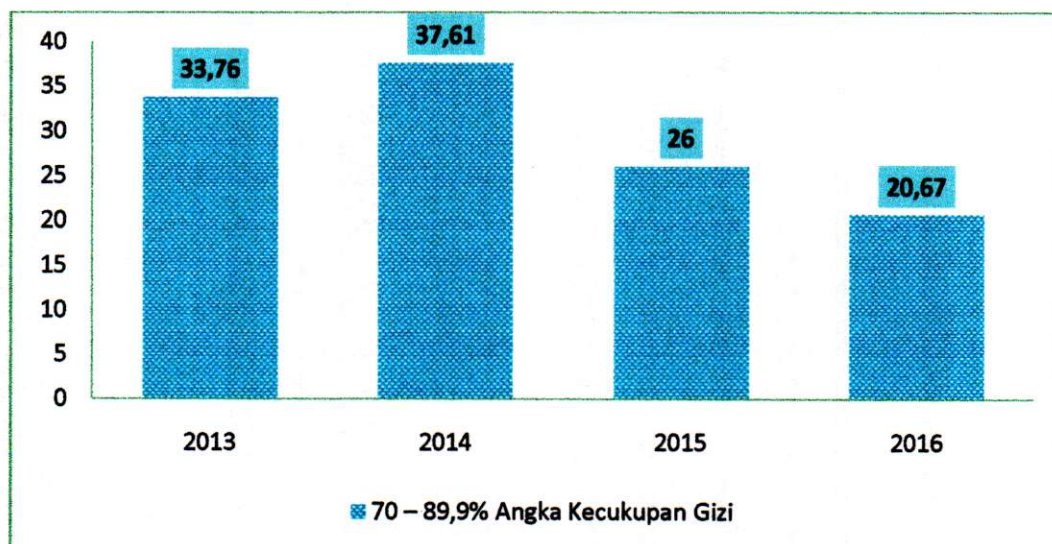
**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**



Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan pada Rakor Pangan se Kaltim 2016

Gambar 2.9
Persentase Penduduk Sangat Rawan Pangan (<70% Angka Kecukupan Gizi) Kabupaten Berau Tahun 2013- 2016

Presentase penduduk dengan kondisi sangat rawan pangan (<70% AKG) terjadi peningkatan, tahun 2014 sebesar 9,32% meningkat menjadi sebesar 15,52% di tahun 2016. Jika dilihat dari jumlah penduduk, maka jumlah penduduk sangat rawan pangan di Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari 19.584 jiwa (9,32 persen) tahun 2014 menjadi 33.341 jiwa (15,52 persen) pada tahun 2016.



Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan pada Rakor Pangan se Kaltim 2016

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Rawan Pangan (70-89,9% Angka Kecukupan Gizi) Tahun 2013- 2016 Kabupaten Berau

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

Persentase penduduk dengan kondisi rawan pangan meningkat sebesar 3,85% pada tahun 2014. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 hingga menjadi sebesar 20,67% penduduk di Kabupaten Berau mengalami kondisi rawan pangan.

Berikut data jumlah desa prioritas kerentanan dan kerawanan pangan dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Berau.

Tabel 2.4
Jumlah Desa Prioritas Kerentanan dan Kerawanan Pangan
Kab. Berau Tahun 2016

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa Prioritas				Total
		1	2	3	4	
1.	Kelay	-	6	6	-	14
2.	Talisayan	-	-	2	8	10
3.	Tabalar	-	1	1	4	6
4.	Biduk Biduk	1	1	2	2	6
5.	Pulau Derawan	-	1	-	4	5
6.	Maratua	-	1	2	1	4
7.	Sambaliung	-	2	6	6	14
8.	Tanjung Redeb	-	-	-	6	6
9.	Gunung Tabur	-	1	3	7	11
10.	Segah	2	8	1	2	13
11.	Teluk Bayur	-	-	-	6	6
12.	Batu Putih	-	1	-	6	7
13.	Biatan	-	-	1	7	8

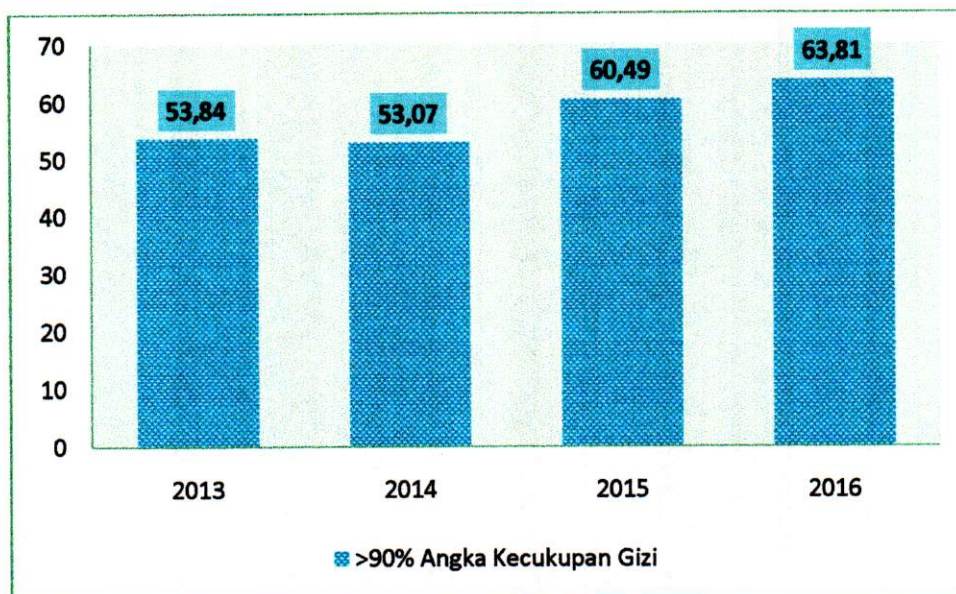
Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan pada Rakor Pangan se Kaltim 2016

Keterangan:

1 sangat rawan pangan
2 = rawan pangan
3 = aman pangan
4 = sangat aman pangan

Tingkat kerawanan pangan berdasarkan konsumsi kalori sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain penyediaan pangan, harga pangan, pendapatan keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan, serta pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Tingkat pendapatan yang rendah di bawah harga pangan, akan mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mengakses kebutuhan pangan, sehingga asupan pangan pada tingkat perseorangan di keluarga akan berkurang, dan secara bertahap akan mengarah pada timbulnya kasus gizi buruk, yang akan menciptakan kualitas sumberdaya yang lemah.

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**



Sumber : RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur 2014 - 2018

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Tahan Pangan (>90% Angka Kecukupan Gizi) Tahun 2013 - 2016 Kabupaten Berau

Dari tahun 2013 hingga 2016 jumlah penduduk yang masuk kategori tahan pangan terus mengalami peningkatan. Dari jumlah penduduk Kabupaten Berau sebanyak 214.828 jiwa pada tahun 2016, sejumlah 137.081 jiwa berada pada kondisi tahan pangan. masih ada sekitar 77.746 jiwa yang diharapkan menuju kondisi tahan/aman pangan.

7. Perkembangan Keamanan Pangan Segar

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan menuntut akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Gambaran kondisi keamanan pangan segar di peredaran dapat diketahui dari hasil pengujian keamanan pangan segar. Pengujian tersebut meliputi pengujian residu pestisida, mikroba dan logam berat.

Tabel 2.5
Jumlah pengujian sampel pangan segar Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sampel yang diambil dan di uji	63	50	52	20	13

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pangan Kab. Berau 2016 – 2021

8. Perkembangan Keamanan Pangan Olahan

a. Sampling dalam Rangka Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

Pangan Jajanan Anak Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan asupan energi dan gizi bagi anak usia sekolah. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna rhodamin B dan methanyl *yellow* oleh produsen pangan jajanan adalah salah satu contoh masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran produsen tentang keamanan pangan jajanan.

SD/MI yang telah diintervensi selama Aksi Nasional PJAS di daerah semakin meningkat yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan percontohan dalam upaya peningkatan keamanan pangan di lingkungan sekolah pada khususnya serta di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada umumnya. Oleh karena itu, SD/MI tersebut perlu didukung dengan pendampingan atau bimbingan teknis lainnya agar sekolah mampu mandiri menjaga keamanan pangan di lingkungannya.

Gerakan Aksi Nasional Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 31 Januari 2011 sudah berakhir di tahun 2014. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Berau sudah dilakukan intervensi baik melalui Intervensi A, B dan C. Tahun 2016, BBPOM di Samarinda melakukan pengawalan AN PJAS dengan melakukan sampling dan uji PJAS di tempat menggunakan rapid test kit ke SD yang belum terintervensi AN-PJAS pada 48 sekolah.

b. Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

Tahun 2016 BBPOM di Samarinda menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator PJAS di Kabupaten Berau. Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS dilaksanakan dengan cara penyampaian modul pelatihan dan dilakukan evaluasi penilaian pada hasil pre dan post test. Peserta pelatihan memperoleh sertifikat telah mengikuti pelatihan fasilitator keamanan PJAS bila hasil evaluasi post test minimal nilai 70. Bagi peserta yang memperoleh sertifikat telah mengikuti pelatihan fasilitator keamanan PJAS pengawalan AN-PJAS akan ditindaklanjuti sesuai Panduan Pengawalan Intervensi AN-PJAS yang ditetapkan Badan POM. Data peserta pelatihan fasilitator keamanan PJAS di Kabupaten Berau Tahun 2016 berdasarkan data dari Laporan Tahunan Balai Besar POM Samarinda, 2016, sebanyak 30 peserta.

9. Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan

Tahun 2016 terdapat 4 (empat) jenis kejadian luar biasa keracunan pangan yang terjadi di 4 (empat) kecamatan. Berikut data jenis kejadian luar biasa di Kabupaten Berau pada tahun 2016.

**Tabel 2.6
Jenis Kejadian Luar Biasa Kabupaten Berau Tahun 2015 - 2017**

No.	Jenis Kejadian Luar Biasa	Yang Terserang		Jumlah Penderita		
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	L	P	L+P
Tahun 2015						
1.	Keracunan Pondok Pesantren Al Kholil Sambaling	1	1	10	21	31
2.	Keracunan Trans Sambaliung	1	1	9	14	23
3.	Keracunan Tanjung Batu	1	1	14	10	24
4.	Keracunan Bedungun	1	1	15	8	23
5.	AFP di Labanan	1	1	1		1
6.	Campak Lemunjan Sambaliung	1	1	2	3	5
7.	Gigitan anjing merah delima	1	1	0	1	1
8.	Gigitan anjing jln bulungan	1	1	0	1	1
9.	AFP di Biatan lempake	1	1	0	1	1
10.	Difteri Gunung Panjang	1	1	0	1	1
Tahun 2016						
11.	Keracunan makanan		1	32	32	64
12.	AFP		1			2
13.	AFP		1			1
Tahun 2017						
14.	Keracunan makanan	1	1	31	22	53

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Berau 2015 - 2017

10. Kondisi Degradasi dan Pencemaran Lingkungan yang Berpengaruh pada Kesehatan

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang tinggi dan beragam di Indonesia. Di wilayah laut kabupaten ini terdapat terumbu karang yang luas dengan kondisi cukup baik. Keragaman terumbu karang Berau tertinggi kedua di Indonesia setelah Raja Ampat dan ke tiga di dunia. Hutan mangrove ditemukan di Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir.

Sejumlah pulau-pulau kecil dan ekosistem padang lamun juga terdapat di daerah ini. Beberapa spesies yang dilindungi dapat ditemukan seperti penyu, paus, lumba lumba, duyung dan beberapa spesies lainnya. Perairan Berau dikenal sebagai wilayah yang memiliki habitat penyu hijau terbesar di Indonesia. Selain itu, potensi perikanan dan pariwisatanya masih baik. Namun demikian, di kawasan pesisir dan laut Berau juga terdapat berbagai permasalahan seperti perusakan terumbu karang, penurunan populasi penyu, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Kerusakan daerah pesisir dan indikasi perkembangan Delta Sungai Mahakam dan Berau ke arah lepas pantai, erat sekali hubungannya dengan kegiatan di daratan Kalimantan timur terutama eksploitasi kayu secara liar (illegal logging) dan penebangan hutan mangrove di daerah pesisir yang makin lama tidak terkontrol.

Kendati masuk ke dalam salah satu tujuan wisata bawah laut kelas dunia, Kabupaten Berau masih harus berlutut dengan maraknya penggunaan bom dan racun ikan yang digunakan oleh nelayan setempat. Sebanyak 12 pulau yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau, Kalimantan Timur dengan luasan 1,2 juta ha, diperkirakan sebanyak 40 % atau 480.000 ha merupakan kawasan terumbu karang. Saat ini kerusakan terumbu karang yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau mencapai 60 persen dari luas total sebesar 480.000 hektare. Ini salah satunya diakibatkan oleh cara menangkap ikan dengan bahan kimia dan bom.

Rata-rata kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Derawan termasuk buruk. Kondisi ini dikarenakan dahulu masyarakat nelayan menggunakan bahan peledak dan racun untuk mencari ikan di sekitar Pulau Derawan. Karang-karang mati dan patahan-patahan karang yang sudah cukup lama di dasar laut menjadi Rubble dengan presentase berkisar 11-52 persen. Ditemukan juga karang mati ber-Algae (Death Coral Algae/ DCA) cukup banyak pada beberapa lokasi pengamatan di luar PIT (Point Intercept Transect).

Banyaknya karang mati yang ditemukan, juga diduga disebabkan oleh aktivitas manusia dari daratan akibat pembukaan lahan untuk penginapan yang dapat meningkatkan kekeruhan, mengurangi cahaya matahari yang masuk sehingga dapat menghambat pertumbuhan zooanthelae simbiosis dari karang. Disamping itu, aliran drainase yang mengandung kotoran yang terbuang ke perairan pantai memacu pertumbuhan algae yang akan bersaing dengan larva karang untuk menempel pada substrat keras. Penangkapan ikan secara berlebihan dapat membuat masalah ini bertambah buruk karena ikan-ikan pemakan algae juga ikut tertangkap.

Kondisi buruknya kualitas air dan ekosistem laut mempengaruhi kualitas ikan sebagai pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Berau. Untuk itu sangat berpengaruh pada kualitas ikan yang dijadikan bahan pangan.

11. Kesehatan Pendidikan Anak Sekolah

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah Program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat/kemampuan hidup sehat dengan warga sekolah. Melalui Program UKS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan diselenggarakannya Program UKS secara umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak

yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup:

1. Penurunan angka kesakitan anak sekolah.
2. Peningkatan kesehatan peserta didik (fisik, mental, sosial)
3. Agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah
5. Meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkoba, rokok, alkohol dan obat-obatan berbahaya lainnya.

Sasaran Program UKS meliputi seluruh peserta didik, baik di Jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Adapun Kegiatan-Kegiatan UKS meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan (gigi, mulut, mata, telinga, tenggorokan, kulit dan rambut)
2. Pemeriksaan perkembangan kecerdasan
3. Pemberian imunisasi
4. Penemuan kasus-kasus dini
5. Pengobatan sederhana
6. Pertolongan pertama
7. Rujukan

Beberapa kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TPUKS) diantaranya:

1. Pembinaan sarana keteladanan gizi, seperti kantin sekolah
2. Pembinaan sarana keteladanan lingkungan, seperti pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan sampah, SPAL, WC, dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas, usaha mencegah pengendalian vektor penyakit.
3. Pembinaan personal hygiene peserta didik dengan pemeriksaan rutin kebersihan kuku, telinga, rambut, gigi serta dengan mengajarkan cara gosok gigi yang benar.
4. Pengembangan kemampuan peserta didik untuk berperan aktif dalam pelayanan kesehatan antara lain dalam bentuk kader kesehatan sekolah dan dokter kecil.
5. Penjaringan kesehatan peserta didik baru.
6. Pemeriksaan kesehatan secara periodik
7. Imunisasi, pengawasan sanitasi air, usaha P3K di Sekolah

8. Rujukan medik, penanganan kasus anemia.
9. Forum komunikasi terpadu dan pencatatan pelaporan.

Presentase Jumlah UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) pada Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Kabupaten Berau di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah Ruang UKS se-Kabupaten Berau

Uraian	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Jumlah Sekolah	160	46	19	14	1
Jumlah Sekolah Yang Memiliki Ruang UKS	44	29	6	3	-
Persentase(%)	27,5	63,04	31,58	21,43	0

Sumber : RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur

2.1.2 Situasi Gizi

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tumbuh kembang seseorang yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Status gizi masyarakat sering digambarkan dengan besaran masalah gizi pada kelompok anak balita yang merupakan kelompok yang rawan gizi.

Uraian status gizi terdiri dari: (1) status gizi balita; (2) status gizi anak umur 5 – 18 tahun; (3) status gizi penduduk dewasa; (4) risiko kurang energi kronis (KEK); dan (5) wanita hamil risiko tinggi (risti).

Menurut Laporan Pemantauan Status Gizi Kemenkes Tahun 2017 menyatakan bahwa status gizi balita dinilai menurut 3 (tiga) indeks yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Istilah status gizi yang digunakan dalam RAD - PG ini antara lain:

1. Pendek, istilah untuk gabungan sangat pendek dan pendek (*stunting*), indeks yang digunakan adalah TB/U, yaitu tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu;
2. Berat kurang, istilah untuk gabungan gizi buruk dan gizi kurang (*underweight*) indeks yang digunakan adalah BB/U, yaitu berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu;
3. Kurus, istilah untuk gabungan sangat kurus dan kurus (*wasting*) indeks yang digunakan adalah BB/TB, yaitu berat badan anak dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO.

Adapun kondisi masing-masing status gizi diuraikan sebagai berikut:

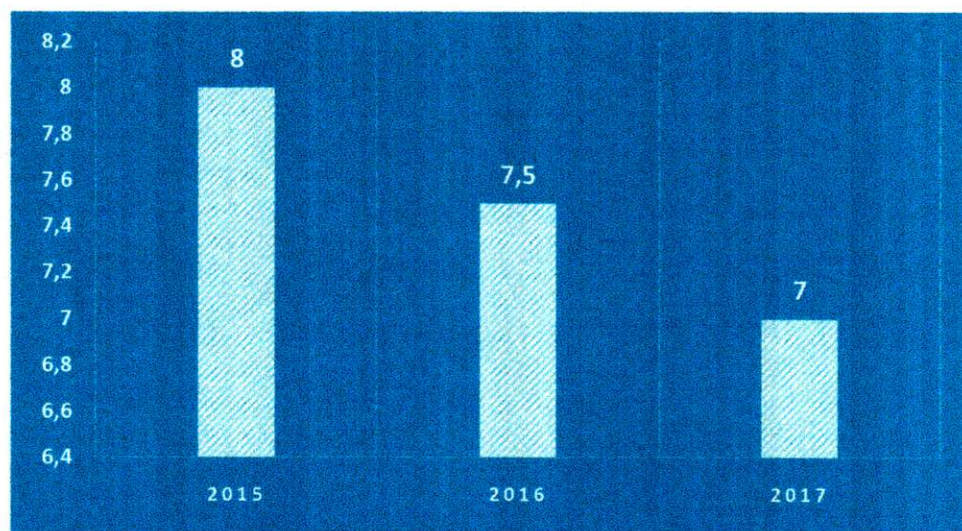
1. Prevalensi Stunting Pada Anak Balita

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (KEK) sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Menurut WHO (2010) Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30 - 39 persen dan serius bila prevalensi pendek ≥ 40 persen.

Berdasarkan Pantauan Status Gizi Tahun 2016, data prevalensi balita stunting (balita pendek) di Kabupaten Berau terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 27,2 persen.

2. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

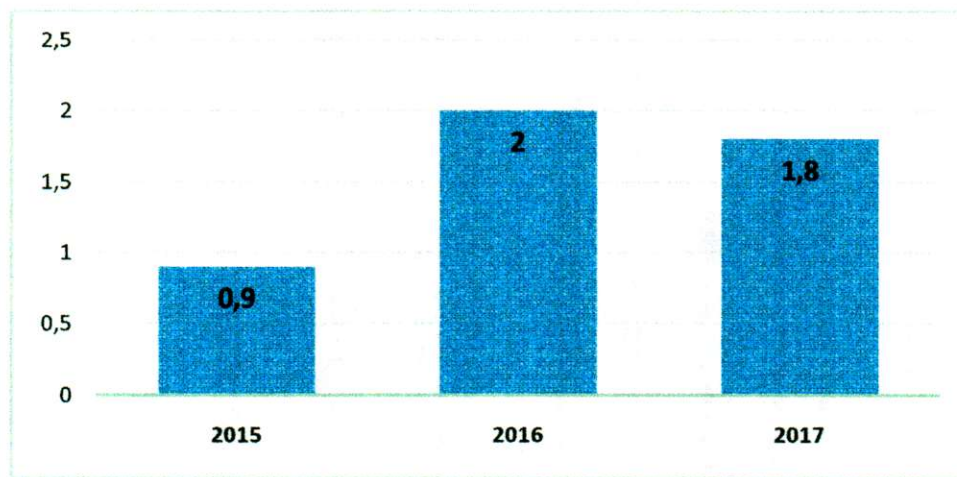
Penilaian status gizi yang dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang menggambarkan perolehan gizi kurus/wasting (Depkes RI, 2013). Wasting pada anak balita merupakan keadaan gabungan sangat kurus dan kurus (Pantauan Status Gizi, 2016)..Masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius apabila prevalensi gizi kurus antara 10,0%-14,0%, dan dianggap kritis apabila melebihi $\geq 15\%$ (WHO, 2010).Berdasarkan angka tersebut maka prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Berau masuk pada kategori kritis. Berikut prevalensi balita gizi buruk dan balita gizi kurang di Kabupaten Berau tahun 2015 hingga 2017.



Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, 2016 - 2021

Gambar 2.12

Prevalensi Balita Kurang Gizi Kabupaten Berau Tahun 2015 - 2017



Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, 2016 – 2021

Gambar 2.13

Prevalensi Balita Gizi Buruk (IKK) Kabupaten Berau Tahun 2015–2017

3. Kurang Energi Kronis Pada Ibu Hamil

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mempunyai kecenderungan menderita KEK. Seseorang dikatakan menderita risiko KEK bilamana LILA <23,5 cm.

Pada tahun 2017 terdapat 424 bumil yang menderita KEK dan 271 bumil diantaranya mendapatkan PMT (63%). Ini berarti masih terdapat bumil KEK yang tidak mendapatkan PMT dan tetap mengalami KEK. Dan juga sekitar 30-34% Bumil tidak mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), hal ini dapat menyebabkan bumil menderita Anemia Zat Besi. Sehingga dengan tingginya Bumil KEK dan Anemia akan berdampak pada tingginya kelahiran premature dan BBLR dan menyebabkan peningkatan kematian bayi akibat BBLR dan Premature. Selain itu juga masih kurangnya tingkat pengetahuan petugas dalam penanganan bayi baru lahir dan ketersediaan sarana dan prasarana di beberapa fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai turut menunjang peningkatan kasus kematian bayi, serta masih ada persalinan ditolong oleh non nakes.

4. Menyusui ASI Eksklusif

ASI Eksklusif (menurut WHO) adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. Tahun 2015 bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 60,15%, Tahun

2016 menurun menjadi 31,3%, 2017 sebesar 63,23% dan meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 62,99%.

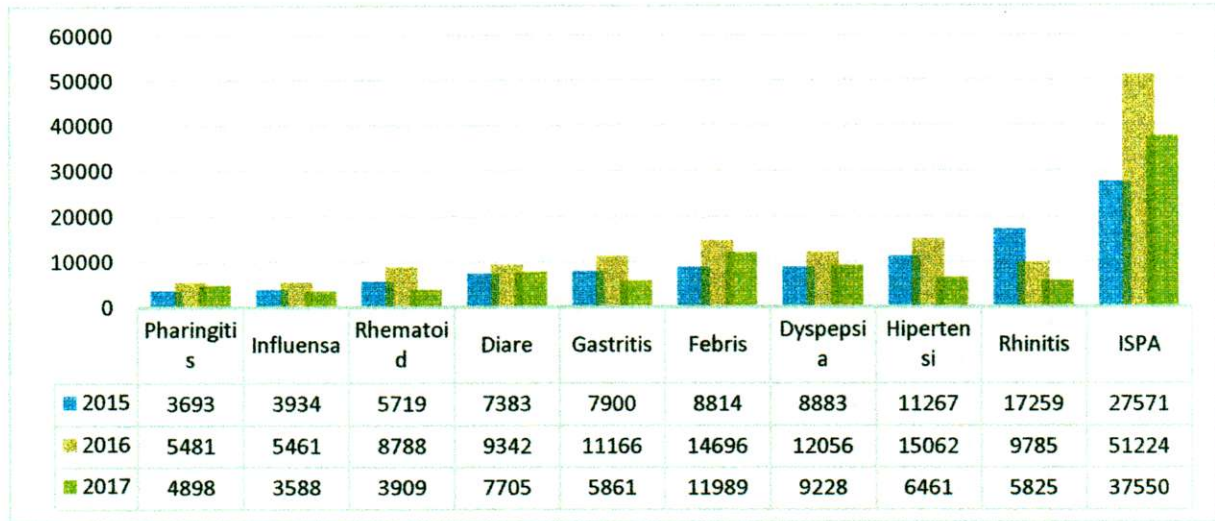
2.2 KONSEKUENSI PANGAN DAN GIZI DALAM PEMBANGUNAN

2.2.1 Pergeseran Tren Penyakit

Perhatian terhadap penyakit tidak menular semakin meningkat seiring meningkatnya frekuensi kejadian penyakit di masyarakat. Di Indonesia terjadi perubahan pola penyakit yaitu dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, yang dikenal sebagai transisi epidemiologi. Prevalensi PTM berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 antara lain hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas di Indonesia adalah sebesar 25,8%, Penyakit Jantung Koroner (PJK) penduduk usia 18 tahun ke atas 1,5%, gagal jantung 0,3%, gagal ginjal kronik 0,2%, batu ginjal 0,6%, rematik 24,7%, stroke 12,1%, cedera semua umur 8,2%, asma 4,5%, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) penduduk usia 30 tahun ke atas 3,8%, kanker 1,8%, diabetes mellitus 2,1%, hipertiroid pada penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan diagnosa 0,4% dan cedera akibat transportasi darat 47,7%.

- Pada tahun 2015 di Kabupaten Berau, penyakit infeksi berbasis lingkungan masih mendominasi 10 besar penyakit di Kabupaten Berau, yaitu infeksi saluran pernafasan atas akut (ISPA), Infeksi akut lain pada saluran Pernafasan atas (Rhinitis), Hipertensi primer, Dyspepsia, Febris, Gastritis, Diare & Gastroenteritis Non spesifik, Rheumatoid Arthritis, Influenza, Virus tidak teridentifikasi, Pharyngitis.
- Sepuluh besar penyakit pada tahun 2016 di Kabupaten Berau berturut-turut antara lain: Nasopharyngitis Akuta (Common Cold, ISPA), Hipertensi Primer, Febris, Dyspepsia, Gastritis, Infeksi Akut Lain pada Saluran Pernafasan Atas (Rhinitis) Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik, Rheumatoid Arthritis Lain, Pharyngitis, serta Influenza.
- Pada tahun 2017, 10 besar penyakit di Kabupaten Berau, yaitu ISPA, Febris, Dyspepsia, Diare, Hipertensi Primer, Gastritis, Rhinitis, Pharyngitis, Rheumatoid Arthritis, dan Influenza.

Grafik dibawah menunjukkan 10 penyakit terbanyak di wilayah Kabupaten Berau sepanjang tahun 2015 - 2017, dimana terdapat beberapa penyakit berbasis lingkungan seperti Diare, penyakit tidak menular seperti Hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya yang merupakan penyakit menular.



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Berau, tahun 2015 - 2017

Gambar 2.14

Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak di Kab. Berau tahun 2015 – 2017

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan wabah sejak dini di Kabupaten Berau, strategi dilakukan dengan penguatan sistem *surveillance* dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan. Sedangkan kebijakan yang ditempuh, yaitu:

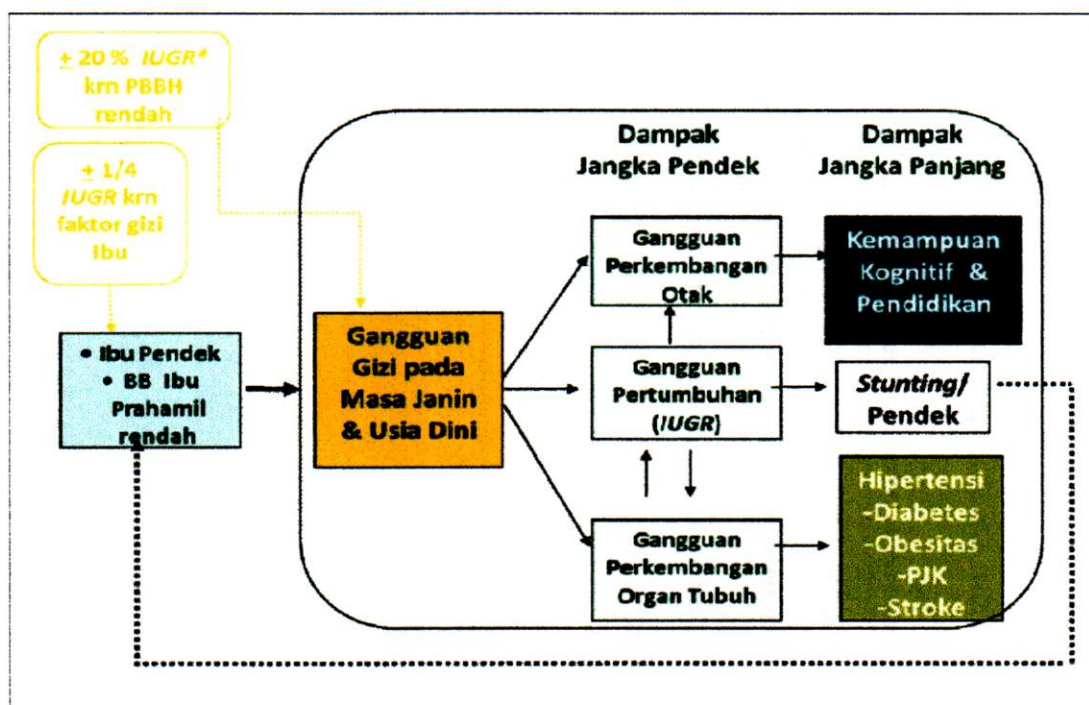
- a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyediaan pelayanan Puskesmas 24 jam serta RS Pratama.
- b. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat.

2.2.2 Peran dan Dampak Pangan dan Gizi Dalam Pembangunan

Pangan dan gizi merupakan modal dasar pembangunan serta dijadikan indikator atas keberhasilan pembangunan. Komponen ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berperan secara optimal dalam pembangunan.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan adalah tercapainya status gizi masyarakat yang optimal sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang

optimal. Dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat gangguan gizi pada masa janin dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat – BAPPENAS

Gambar 2.15

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang Akibat Gangguan Gizi pada Masa Janin

Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi, dilaksanakan koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Terkait kebijakan pangan dan gizi, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menjelaskan bahwa Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan

gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaan program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tersebut mengacu pada Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah/RAD-PG Kabupaten.

Diharapkan target dalam RAD-PG yang disusun dapat tercapai dengan memperhatikan kebijakan, strategi, SDM, dan aspek pembiayaan. Mengingat pembangunan ketahanan pangan dan gizi bersifat lintas sektor, maka dalam menyusun rencana aksi maupun rencana implementasinya, semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan harus diutamakan. Kemitraan antar pemerintah dengan masyarakat dan swasta juga merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

2.3 KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI

2.3.1 TelaahanRADPangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 menjadi pedoman bagi penyusunan RAD PG kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan yang dimonitoring dalam RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 memuat sejumlah indikator yang akan dievaluasi secara berkala. Adapun indikator yang dievaluasi, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Indikator untuk Evaluasi Pengembangan Ketahanan Pangan dan Gizi

INDIKATOR	DATA DASAR 2013	2014	2015	2016	2017	2018
PILAR I: GIZI MASYARAKAT						
1. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100	100
2. Persentase balita yang ditimbang berat badannya	47,07	51,34	51,7	53,75	74	80
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	58,3	66,2	65	70,96	44	47
4. Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium	97,7	97,65	94,53	98,71	95	95
5. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A	61,04	64,7	67,3	72,32	80,7	85
6. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	54,63	81,8	75,1	83,32	90	95
7. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	-	-	-	31,17	65	80
8. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	15	15	39,06	37,75	80	85
9. Persentase remaja puteri mendapat TTD	-	-	-	5,47	36	34

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

INDIKATOR	DATA DASAR 2013	2014	2015	2016	2017	2018
10. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	87,95	93,31	84,4	85,65	90	95
11. Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD	41,3	-	-	60,96	46,52	48,26
12. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (berat badan <2500 gram)	-	-	-	4,04	9,4	8,9
13. Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS (K)	64,7	82,5	78,67	66,7	100	100
14. Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya	62,76	63,55	77,5	74,8	78,1	79,2
15. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya (T)	17,55	21,4	25,4	25,2	21,9	20,8
16. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T)	2,18	2,3	2,3	3,03	1,75	1
17. Persentase balita di Bawah Garis Merah (BGM)	1,19	1,1	0,83	0,8	0,47	0,17
18. Persentase ibu hamil anemia	-	-	25,66	10,7	30,24	29,12
PILAR II : AKSESIBILITAS PANGAN						
1. Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan (unit)	0	2	19	3	2	21
2. Penanganan daerah rawan pangan (desa)	20	16	20	24	28	32
3. Ketersediaan data desa rawan pangan (jumlah Kab/kota)	1 Provinsi 8 Kab	1 Provinsi 7 Kab	1 Provinsi 7 Kab	1 Provinsi 7 Kab	1 Provinsi 7 Kab	1 Provinsi 7 Kab
4. Terlaksananya system Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten/ kota	3 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota
5. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	0 ton	123 ton	221 ton	212 ton	212 ton	250 ton
6. Jumlah lembaga distribusi pangan di daerah produsen pangan (PUPM) Gapoktan	0	0	6 Gapoktan	6 Gapoktan	6 Gapoktan	0
7. Jumlah kab/kota melakukan pendataan dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan	6 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota
8. Jumlah kab/ kota memantau dan pemantauan distribusi, harga dan akses pangan	6 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota
9. Jumlah desa P2KP	87 KWT	6 KWT	34 KWT	40 KWT	21 KWT	72 KWT
10. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan promosi penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota
11. Jumlah desa tersedia tenaga/petugas lapangan seperti penyuluh (pendamping P2KP)	87 Desa	6 Desa	34 Desa	40 Desa	21 Desa	72 Desa
12. Jumlah kab/kota memantau dan pemantauan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota	1 Provinsi, 9 Kab / Kota
13. Pengembangan kawasan sentra tanaman pangan	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota
14. Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan (unit)	7	17	17	20	25	30
15. Penanganan daerah rawan pangan (desa)	20	16	20	24	28	32

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

INDIKATOR	DATA DASAR 2013	2014	2015	2016	2017	2018
16. Ketersediaan data desa rawan pangan (jumlah Kab/kota)	1 Provinsi 8 Kab/Kota	1 Provinsi 8 Kab/Kota	1 Provinsi 10 Kab/Kota	1 Provinsi 10 Kab/Kota	1 Provinsi 10 Kab/Kota	1 Provinsi 10 Kab/Kota
17. Jumlah produksi daging	52.820,6 Ton	52.820,6 Ton	53.630,9 Ton	54.441,2 Ton	*	*
18. Jumlah produksi telur	13.685,2 Ton	13.950,2 Ton	14.220,5 Ton	14.496 Ton	*	*
19. Konsumsi daging	15,811 kg/kap/t h	19,96 kg/kap/t h	21,93 kg/kap/t h	25,17 kg/kap/t h	*	*
20. Konsumsi telur	5,38 kg/kap/t h	6,54 kg/kap/t h	6,9kg/kap/th	9,62 kg/kap/t h	*	*
21. Jumlah kebuntingan hasil IB	2.358 ekor	2.415 ekor	2.573 ekor	2.730 ekor	*	*
22. Pengembangan budidaya ternak Perah	15 ekor	-	-	(tidak dianggap kanTh. 2016)	*	*
23. Pengembangan budidaya kambing/domba	466 ekor	-	60 ekor	450 ekor	*	*
24. Pengembangan budidaya unggas lokal	5.500 ekor	2.100 ekor	6.000 ekor	(tidak dianggap kanTh. 2016)	*	*
25. Pengembangan budidaya ternak kelinci		100 ekor	-	(tidak dianggap kanTh. 2016)	*	*
26. Pengembangan budidaya ternak babi	100 ekor	-	125 ekor	-	*	*
27. Pengembangan budidaya ternak sapi potong	2.891 ekor	2.258 ekor	13.187 ekor	3.260 ekor	*	*
28. Peningkatan populasi ternak (%):						
- Sapi (%)		**	**	**	6 %	5%
- Kerbau (%)					5%	3%
- Kambing (%)					7%	6%
- Babi (%)					5%	5%
- Ayam Buras (%)					6%	6%
29. Peningkatan Produksi daging (%)		**	**	**	3,3 %	3,3 %
30. Peningkatan Produksi telur (%)		**	**	**	3 %	3%
31. Rehabilitasi Tanaman kakao 5.000 (ha)	1.750	1.250	1.250	1.000	1.250	1.250
32. Perluasan Tanaman Kakao (Ha)	29.629	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
33. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (595.000 ha) untuk Pemenuhan 1 juta Ha	691.766	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
34. Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 30.000 Ha	-	10.000	10.000	10.000	-	-
35. Peremajaan tanaman Lada 3.000 ha	-	750	750	750	750	750
36. Peremajaan tanaman kelapa 6.000 Ha	-	100	1400	1550	1400	1550
37. Volume produksi perikanan tangkap (ribu ton)	136,664	114,842	146,286	101,718	111,890	123,079
38. Volume produksi perikanan budidaya (ribu ton)	94,679	96,851	108,286	99,494	109,443	120,387
39. Peningkatan konsumsi ikan per kapita (kg/tahun)	43	44	46,12	46,41	48,73	51,16
40. Pameran produk perikanan (paket)	4	4	4	4	2	2
41. Peningkatan pemanfaatan				160	160	160

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

INDIKATOR	DATA DASAR 2013	2014	2015	2016	2017	2018
pekarangan dengan mewujudkan HATINYA PKK						
42. Jumlah Penyuluhan Gizi di Posyandu				10	10	10
43. Jumlah hari buka posyandu				24	24	24
44. Jumlah Posyandu terintegrasi				10	10	10
45. Persetanse daya kunjungan masyarakat di Posyandu				80 %	80 %	90 %
46. Jumlah pembinaan dari Pokjanal Posyandu				10	10	10
47. Persentase asupan Gizi anak sekolah				10	10	10
48. Jumlah peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi				75%	75%	80%
PILAR III: MUTU DAN KEMAMAN PANGAN						
1. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi			100%	100%	100%	100%
2. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi			24.5%	25%	30%	30%
3. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat			86,10%	86,60%	87,10%	87,60%
4. Jumlah Komunitas yang diberdayakan			9	12	15	18
5. Jumlah Desa Pangan Aman (sebagai Pilot Project)	0	0	0	0	0	0
6. Jumlah Perangkat Daerah yang diadvokasi	0	0	0	0	0	0
7. Terlaksananya Bulan Keamanan Pangan	0	0	1	1	0	1
8. Jumlah Kader Keamanan Pangan yang diberikan Bimbingan Teknis	0	0	0	30 Orang	0	0
9. Jumlah Komunitas yang diberikan Bimbingan Teknis	0	0	0	0	0	0
10. Jumlah Komunitas Desa yang difasilitasi penerapan Keamanan Pangan	0	0	0	0	0	0
11. Terlaksananya kegiatan Lomba	0	0	0	0	0	0
12. Jumlah pasar yang diintervensimenjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (sebagai Pilot Project)			1	2	3	4
13. Jumlah Kab/Kota yang memberikan komitmen dan menerapkan peraturan Kepala Badan POM terkait Industri Rumah Tangga (IRTP)			4	6	8	10
14. Jumlah Perkara dengan tindak lanjut penyidikan			8	8	9	9
15. Tersertifikasinya usaha Pembudidaya ikan (unit)	50	50	50	50	-	-
16. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi			24.5%	25%	30%	30%
17. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat			86,10%	86,60%	87,10%	87,60%
18. Jumlah Komunitas yang diberdayakan			9	12	15	18
19. Jumlah Kader Keamanan Pangan yang diberikan Bimbingan Teknis				30 orang		
20. Jumlah pasar yang			1	2	3	4

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

INDIKATOR	DATA DASAR 2013	2014	2015	2016	2017	2018
diintervensimenjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (sebagai Pilot Project)						
21. Jumlah Kab/Kota yang memberikan komitmen dan menerapkan peraturan Kepala Badan POM terkait Industri Rumah Tangga (IRTP)			4	6	8	10
22. Jumlah Perkara dengan tindak lanjut penyidikan			8	8	9	9
23. Menurunnya hama penyakit ikan dan meningkatkan mutu hasil budidaya serta menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya Kaltim	20	15	10	10	-	-
24. Penerapan CCS untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan (orang)	20 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org
25. Penerapan GMP dan SSOP bagi UKM sektor kelautan dan perikanan (unit)	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
26. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Lomba Masak Serba Ikan	3 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
27. Keikutsertaan dalam Promosi/Pameran	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
28. Jumlah sosialisasi Public Awareness Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	*	*
29. Jumlah Auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	5 Auditor	1 Auditor	1 Auditor	1 Auditor	*	*
30. Jumlah usaha peternakan yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	11 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	*	*
31. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Peternakan	5 PPNS	-	-	1 PPNS	*	*
32. Jumlah peserta pelatihan pengolahan produk olahan hasil peternakan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	*	*
33. Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV (%)		**	**	**	2	1
34. Penurunan kasus cemaran mikroba (%)		**	**	**	25	2
PILAR IV : PHBS						
1. Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS	55,7	20	30	40	50	65
2. Jumlah Kab/Kota melaksanakan survey PHBS	10	10	10	10	10	10
3. Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengembangan Media PHBS	10	10	10	10	10	10
4. Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengembangan SBH	10	10	10	10	10	10
5. Jumlah kab/kota yang membuat rencana operasional peningkatan rumah tangga ber PHBS	10	10	10	10	10	10
PILAR V : KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI						

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

INDIKATOR	DATA DASAR 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pembinaan kelompok desa mandiri pangan yang dikembangkan (desa)	1 Kali/Thn	2 Kali/Thn	2 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn
2. Pembinaan kelompok pada daerah rawan pangan (desa)	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn
3. Pembinaan kelompok pada desa lokasi P2KP (desa)	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn
4. Pembinaan kelompok pendamping P2KP (desa)	6 Kali/Thn	6 Kali/Thn	6 Kali/Thn	6 Kali/Thn	6 Kali/Thn	6 Kali/Thn
5. Pembinaan pada kelompok untuk pemantauan dan pemantapan P2KP (desa)	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn
6. Penguatan Tim Pangan dan Gizi Kecamatan pada setiap Kab/Kota	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.
7. Revitalisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK
8. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Daerah	1 Prov. 3 KK	1 Prov. 4 KK	1 Prov. 6 KK	1 Prov. 7 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 9 KK
9. Penguatan Kapasitas tenaga pembina	1 Prov. 3 KK	1 Prov. 4 KK	1 Prov. 6 KK	1 Prov. 7 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 9 KK
10. Pendataan kerawanan pangan masyarakat	2 KK	3 KK	4 KK	9 KK	10 KK	14 KK
11. Pendataan Pola Pangan Harapan	1 Prov.	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 8 KK
12. Jumlah penelitian tentang pangan olahan	-	-	1	2	2	3
13. Jumlah penelitian tentang zat gizi mikro	-	-	1	2	2	3
14. Jumlah penelitian tentang pangan lokal	-	-	1	2	2	3

Catatan:* (Tidak dilaksanakan karena indikator berubah pada tahun 2017-2018 sesuai SOTK baru)

** (Tidak dilaksanakan karena indikator baru)

2.3.2 Telaahan RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2006-2026

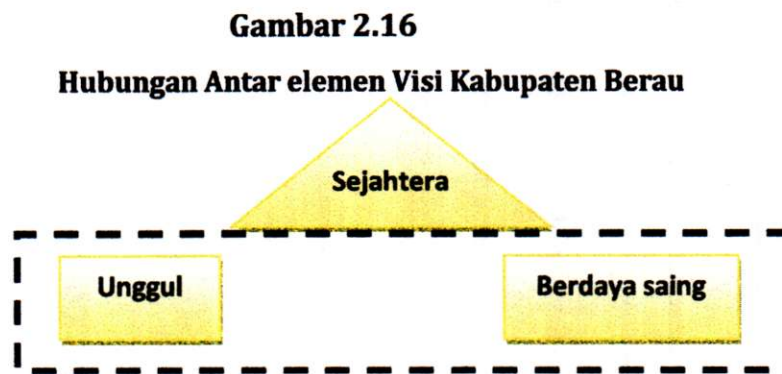
Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau tahun 2006–2026 adalah terwujudnya 'Kabupaten Berau sebagai Sentra Industri dan Daerah Ekowisata Berbasis Pertanian dan Kelautan Terkemuka di Wilayah Indonesia Timur tahun 2026' untuk menuju masyarakat sejahtera dan mandiri sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Berau 2006 – 2026 diatas adalah *Mewujudkan Perekonomian Daerah dengan Berorientasi Kerakyatan, Memiliki Daya Saing dan Berkelanjutan*. Misi tersebut memiliki sasaran yaitu “kemandirian pangan secara aman dengan kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga”.

2.3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis

Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan”. Hubungan antar elemen visi Kabupaten Berau dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : RPJMD Kab. Berau Periode 2016 – 2021

- **UNGGUL** : Berau yang **unggul** mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang **Unggul dan Sejahtera** merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal.
- **SEJAHTERA** : Berau yang **Sejahtera** diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM(peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).
- **BERDAYA SAING** : Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Berau yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya

Pada penjelasan di atas, maka kebijakan daerah dalam pembangunan pangan dan gizi tercantum pada elemen visi Unggul. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat

secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Sesuai dengan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Berau yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan, dukungan Kabupaten Berau terhadap program swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam berpartisipasi mewujudkan keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang cukup rendah menyebabkan ketahanan pangan yang berkelanjutan akan menjadi jalan yang terjal untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus merumuskan solusi khusus mengenai hal tersebut dimana salah satunya adalah dengan pengembangan agro-industri pada subsector pertanian tanaman pangan.

2.3.4 Kebijakan terkait Konsumsi

Sebagai salah satu wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam tergolong tinggi, pengembangan perekonomian lokal daerah Berau melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia merupakan cara yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama ini memiliki program-program yang memberdayakan masyarakat dalam perekonomian lokal tapi kurang maksimal implementasinya. Hal ini dikarenakan permasalahan pengembangan ekonomi lokal selalu terkait dengan permasalahan lain seperti aksesibilitas wilayah, sumber daya manusia, maupun koordinasi pemerintah daerah. Dari masalah utama pengembangan ekonomi lokal daerah yang belum maksimal terdapat permasalahan yang memicu masalah utama salah satunya adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan. Akar masalah dari belum terpenuhinya kebutuhan pangan tersebut disebabkan kurang adanya optimalisasi pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan penggunaan teknologi tepat guna.

Pemerintah Daerah juga mendukung sepenuhnya visi nasional untuk mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani. Dukungan tersebut termuat dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 melalui Visi, Misi, Sasaran dan Isu Strategis Kabupaten Berau, yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pangan Kabupaten Berau bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan

ketahanan pangan daerah dan pemberdayaan penyuluh menuju kemandirian pangan dan kedaulatan pangan Kabupaten Berau.

2.3.5 Kebijakan terkait Akses

Pembangunan pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Sektor pertanian menempati peringkat kedua dalam menyumbang struktur ekonomi di Kabupaten Berau. Untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan terkait akses pangan, Pemerintah memiliki strategi untuk mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; mengembangkan kawasan terpadu mandiri; meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar/swasta; serta mengembangkan produk unggulan lokal.

Agenda utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil guna menghasilkan nilai tambah produk pertanian dan peternakan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Kabupaten Berau memprioritaskan pada upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu produk dan nilai tambah untuk menuju swasembada pangan.

Secara nasional pembangunan peternakan pada dasarnya adalah mengemban misi untuk dapat menyediakan pangan asal ternak baik kualitas maupun kuantitasnya, karena seperti diketahui protein hewani yang didapatkan pada produk-produk peternakan sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia. Peran ternak sebagai sumber pangan hewani masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemenuhan protein dimaksud. Terkait aksesibilitas daging, produksi daging Kabupaten Berau masih rendah dan penerapan teknologi yang belum optimal. Pembangunan peternakan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan budidaya ternak yang masih terbatas serta peningkatan Inseminasi Buatan (IB). Dengan demikian pembangunan peternakan Kabupaten Berau mampumemaksimalkan pembibitan ternak rakyat, meningkatkan prasarana, sarana, serta tenaga medic dan

aramedic veteriner, serta penyediaan bahan pangan asal hewan/ternak yang memahami ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk mendorong pengembangan usaha peternakan, yaitu:

1. Optimasi Inseminasi Buatan (IB)
2. Peningkatan kualitas pakan ternak
3. Peningkatan manajemen budidaya peternakan
4. Kredit Ternak Sejahtera, Asuransi Usaha Ternak Sapi
5. Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskesmas dan Check Point)
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan hewan melalui pengobatan, vaksinasi, biosecurity dan depopulasi
7. Peningkatan pemenuhan produk pangan asal ternak yang ASUH melalui unit Rumah Potong Hewan (RPH) dan unit Rumah Potong Unggas (RPU)

2.3.6 Kebijakan terkait Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau, kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia.
2. Peningkatan promosi kesehatan.
3. Optimalisasi pelayanan gizi.
4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
5. Optimalisasi penanganan kesehatan khusus dan bencana.
6. Pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
7. Pemenuhan kebutuhan peralatan dan sediaan farmasi sesuai standar.
8. Peningkatan sistem informasi kesehatan berbasis IT
9. Pemenuhan kebutuhan dan distribusi tenaga kesehatan dan tenaga lainnya sesuai standar.
10. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan.
11. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan, UPTD Dinas, RS Pratama).
12. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kerja Aparatur.
13. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan.

2.4 TANTANGAN DAN HAMBATAN KUNCI

Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah meningkatnya derajat kesehatan secara lebih merata yang berdampak kepada penurunan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup. Dalam rangka melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau serta Dinas lain terkait, dihadapkan pada beberapa tantangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tantangan dalam memberikan program gizi spesifik dan sensitif dapat dijabarkan pada bagian ini.

2.4.1 Tantangan dan Hambatan Kunci Program Spesifik Gizi Secara Langsung

Sebagaimana disajikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021, Kabupaten Berau memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh gubernur dimana hingga saat ini program tersebut masih jauh dari harapan. Rata-rata hasil panen padi di Kabupaten Berau sebanyak 2,91 ton di setiap hektarnya pada tahun 2015. Sebagai bagian dari provinsi yang memiliki tujuan swasembada pangan, maka seyogianya Kabupaten Berau memberikan kontribusi yang maksimal dalam memenuhi produksi tanaman pangan baik dengan cara pengembangan lahan atau penggunaan teknologi pertanian tepat guna. Hal ini dikarenakan produktivitas tanaman pangan utamanya padi di Kabupaten Berau masih berada di bawah kabupaten sekitar bahkan jauh di bawah angka provinsi yang mencapai 4,17 ton/ha.

Tabel 2.9
Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)
Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya tahun 2016

Wilayah	Padi Sawah (Ha)	Padi Ladang (Ha)	Jagung (Ha)	Kedelai (Ha)
Berau	4.654	7.734	2.819	501
Samarinda*	2.342	100		
Kutai Timur	3.011	5.027	628	55
Kutai Barat	1.287	1.995	69	27
Kalimantan Timur	54.365	25.979	4.948	1.059

**data tahun 2014*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Selain itu, produk pertanian lainnya perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangan maupun distribusinya di setiap wilayah Kabupaten Berau. Sedangkan komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di Kabupaten Berau perlu

mendapat sorotan untuk mulai mengoptimalkan sumber daya regional agar kebutuhan pangan tidak tergantung dari luar wilayah.

Beberapa tantangan dan hambatan kunci program spesifik gizi secara langsung, antara lain disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.10
Tantangan dan Hambatan Kunci Program Spesifik Gizi**

No.	Program/Kegiatan	Tantangan dan Hambatan	Usulan Pemecahan Masalah
1.	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Pemberian Tambahan Makanan dan Vit) /Pemberian Makanan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya kasus bumil KEK dan Anemia 2. Penanganan yang belum komprehensif pada Bumil KEK dan Anemia. 3. Kurangnya komitmen petugas Puskesmas terhadap pentingnya Posyandu. 4. Masih adanya Posyandu yang tidak aktif sehingga cakupan kegiatan Posyandu banyak yang tidak berjalan sesuai program terutama balita ditimbang (D/S) hasilnya sangat rendah yaitu 56,06%, jauh dari target yang ditetapkan yaitu 85%. 5. Peran aktif masyarakat yang rendah khususnya kesadaran untuk menimbang balita di Posyandu. 6. Seringnya terjadi pergantian Kader Posyandu tanpa ada kaderisasi. 7. Belum adanya reward/insentif yang layak bagi kader Posyandu. 8. Kurangnya sarana kelengkapan Posyandu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya integrasi program terutama bidang kesmas (Gizi, KIA, Promkes, Kesling) 2. Perlu ditingkatkan koordinasi dan Pelatihan Penyegaran Kapasitas Petugas Puskesmasserta Petugas Posyandu. 3. Perlu diadakan insentif bagi Kader Posyandu. 4. Perlu diadakannya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan posyandu. 5. Pelatihan kader untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
2.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sosialisasi manfaat ASI sehingga pemahaman manfaat ASI masih kurang di masyarakat bahkan di kalangan petugas kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas petugas konselor ibu menyusui 2. Sosialisasi asi eksklusif ditingkatkan dan pendekatan keluarga 3. Perlunya dibentuk Kelompok Pendukung Asi Eksklusif (KP-ASI)
3.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<p>Masalah kesehatan pada anak yang terkait dengan permasalahan gizi antara lain : Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Kurang Gizi pada Anak Balita, dan Stunting pada Anak di bawah dua tahun.</p> <p>Hambatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada Puskesmas yang tidak ada petugasgizi, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada sosialisasi secara berkala bagi stakeholderterkait. 2. Perlu penerimaan Tenaga Gizi (D3 Gizi) untuk ditempatkan di Puskesmas yang belum ada tenaga gizi dan juga penambahan tenaga petugas gizi untuk Puskesmas Rawat Inap serta Puskesmas Tanjung Redeb dan Bugis agar

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

No.	Program/Kegiatan	Tantangan dan Hambatan	Usulan Pemecahan Masalah
		<p>seyogyanya petugas gizinya ditambah.</p> <p>2. Balita gizi buruk yang dirujuk hanya yang ditemukan bukan hasil pelacakan petugas gizi Puskesmas, sehingga tentunya masih ada balita balita gizi buruk disekitarnya yang tidak ditemukan dan tidak dirujuk. Balita menderita gizi buruk terlambat dirujuk dengan berbagai alasan, sehingga ada beberapa balita gizi buruk dirujuk dalam keadaan kritis.</p>	<p>surveilans, kegiatan di dalam gedung terutama konseling gizi serta pemantauan pertumbuhan di luar gedung/Posyandu bisa berjalan optimal.</p> <p>3. Perlu diaktifkan kembali pojok gizi/konsultasi gizi di puskesmas.</p>
4.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	<p>1. Petugas Analis di puskesmas belum semua terlatih cara pemeriksaan TB Paru sesuai standar.</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri (Pasif Case Finding).</p> <p>3. Yang dilaporkan hanya penderita positif saja.</p> <p>4. Tingginya biaya transport bagi penderita yang jauh dari Fasilitas Kesehatan.</p> <p>5. Sebagian besar penderita HIV/AIDS yang ditemukan adalah para pekerja seks yang datang dari luar Kabupaten Berau. Umumnya kerja sama dengan pemilik sarana tempat mereka kerja tidak secepatnya memberi informasi jika ada pendatang baru guna diperiksa sebelum bekerja/menularkan penyakit</p>	<p>1. Perlunya Pelatihan Bagi petugas analis puskesmas tentang pemeriksaan TB Paru sesuai standar.</p> <p>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.</p> <p>3. Melaporkan semua pasien TB Paru yang diperiksa.</p> <p>4. Program inovatif yakni analis/pemegang program untuk mengambil sampel/Sputum bagi suspect di kampung yang tidak bersedia datang ke Laboratorium Puskesmas.</p> <p>5. Perlu dipertahankan survei/pelacakan kasus ketempat hiburan sebagai wilayah resiko tinggi, diperlukan adanya kerja sama dengan perusahaan untuk memeriksakan karyawan baik secara rutin saat medical check up maupun saat recruitment untuk menemukan secara dini demi memutus mata rantai penularan dan sekaligus penanganan secara dini. Untuk itu diperlukan SDM yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/Aids di Kabupaten Berau.</p>
	Peningkatan imunisasi	<p>1. Masih banyak sasaran yang mendapatkan pelayanan imunisasi pada dokter praktek swasta dan tidak terdata di puskesmas, sehingga cakupan di</p>	<p>1. Dukungan dana untuk sweeping untuk kegiatan imunisasi rutin.</p> <p>2. Kerja sama lintas program terutama imunisasi dan KIA harus ditingkatkan.</p>

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

No.	Program/Kegiatan	Tantangan dan Hambatan	Usulan Pemecahan Masalah
		<p>puskesmas kurang terutama pada daerah perkotaan.</p> <p>2. Tingginya mobilisasi penduduk terutama pada wilayah perkebunan dan tambang</p>	<p>3. Pembentukan Pokja peduli Imunisasi masing –masing Posyandu.</p>
	<p>Program Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	<p>Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan P2PTM, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak masyarakat belum memahami tentang P2PTM dan manfaat Posbindu 2. Kurangnya sosialisasi dari tenaga Kesehatan Pengelola Program PTM di puskesmas melaksanakan tugas rangkap sebagai pengelola program yang lain. 3. Dukungan dari Tokoh masyarakat masih Kurang 4. Dukungan dari Pemerintah belum sepenuhnya (dana tidak ada) 5. Minimnya sarana pendukung (Posbindu Kit) <p>Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa di Kabupaten Berau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak masyarakat belum memahami tentang Kesehatan jiwa 2. Kurangnya sosialisasi dari tenaga Kesehatan 3. Dukungan dari Tokoh masyarakat masih Kurang 4. Dukungan keluarga masih kurang 5. Dukungan dari Pemerintah belum sepenuhnya (dana tidak ada) 6. Petugas Puskesmas belum ada yang dilatih khusus untuk Kesehatan jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan peningkatan sosialisasi tentang Posbindu dan PTM ke masyarakat 2. Peningkatan SDM petugas dalam pelaksanaan program 3. Mengusulkan untuk dibentuk Posbindu di SLTA untuk peningkatan capaian pelayanan kesehatan 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. 5. Mengusulkan pengadaan Posbindu KitAdvokasi untuk dukungan dari segi dana/anggaran ke pemerintah daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bebas pasung bagi penderita ODGJ melalui dana BOK Puskesmas 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melakukan KIE kepada keluarga penderita ODGJ melalui petugas puskesmas setempat 3. Membuat Surat ke Bupati dan RSUD Dr. A. Rivai Agar segera membukaruang khusus rawat inap bagi penderita ODGJ. 4. Mengusulkan dana melalui APBD-P tahun 2018 dan sudah di advokasi oleh Bupati Berau.

2.4.2 Tantangan dan Hambatan Kunci Program Sensitif Gizi Secara Langsung

Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan, karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persendalamstunting pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana. Berikut tantangan dan hambatan kunci program sensitif gizi secara langsung beserta usulan pemecahan masalah.

**Tabel 2.11
Tantangan dan Hambatan Kunci Program Sensitif Gizi**

Intervensi gizi spesifik	Program	Tantangan dan Hambatan	Usulan Pemecahan Masalah
- Pertanian dan Ketahanan Pangan;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian dan perkebunan)	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura masih Rendah	Meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapang dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi yang diperlukan.
- Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Keterlibatan anak pada forum anak belum optimal 2. Pengaruh negatif kemajuan teknologi terhadap perkembangan perilaku anak	
- Pendidikan dalam kelas	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
- Sanitasi dan air bersih	Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Pelaksanaan Kursus sanitasi Makanan, Penyuluhan keamanan pangan dan Kursus Depo Air Minum yang merupakan persyaratan untuk penerbitan Sertifikat laik Higiene Sanitasi dan SPP-IRT pelaksanaannya mengalami kendala karena mekanisme pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan. Biaya Kursus atau pun PKP dibebankan kepada masyarakat namun perda Retribusi untuk memungut biaya tersebut belum ada dan sesuai aturan ASN tidak boleh melakukan pungutan tanpa retribusi ataupun penggunaan dana langsung dari masyarakat. 2. Puskesmas yang	1. Mengadvokasi agar Pembahasan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Berau di Percepat. 2. Peningkatan pembiayaan dari APBD untuk mengatasi kekurangan anggaran pelaksanaan Kegiatan Pengawasan keamanan pangan. 3. Peningkatan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan sertifikasi kantin sekolah 4. Peningkatan kerjasama dengan sector terkait seperti Dinas Pendidikan dalam meningkatkan sertifikasi kantin sekolah, Dinas Prindakop, Satpol PP untuk pembinaan dan stikerisasi makanan jajanan, pengawasan Post

**RENCANA AKSI DAERAH - PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BRAU 2016 - 2021**

Intervensi gizi spesifik	Program	Tantangan dan Hambatan	Usulan Pemecahan Masalah
		memiliki Sanitarian Kit termasuk Food Contamination Kit di Kabupaten Berau baru 1 yaitu puskesmas Sambaliung sedangkan Puskesmas lainnya belum ada, padahal peralatan ini sangatdibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan makanan/pangan dan pengawasan kualitas lingkungan pada umumnya	market PIRT. 5. Melanjutkan dan Meningkatkan kerjasama dengan PHRI, UMKM, Asosiasi Depot air minum, NGO, aparat kampung, tenaga Pendamping Pembangunan kampung, dalam pelaksanaan Kursus Higiene sanitasi makanan, PKP, kursus Depot air minum.
Pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan 2. Kesetaraan pria ber KB masih rendah 3. Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB 4. Pelayanan kontrasepsi secara gratis kepada masyarakat miskin belum optimal 5. Belum semua klinik KB tersedia tenaga medis yang berkualitas 6. Dukungan kader dan masyarakat dalam pendataan belum optimal 7. Kurangnya tenaga penyuluh KB (PKB) sehingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB 	Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain / Stekeholder dalam program Keluarga Berencana (KB).

2.4.3 Tantangan dan Hambatan Kunci Program Spesifik dan Sensitif Gizi Secara Tidak Langsung

Pelaksanaan program gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara

lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Tantangan dan hambatan program gizi spesifik dan sensitif secara tidak langsung antara lain:

a. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pembangunan daerah

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah harus merumuskan program-program kegiatan yang mengoptimalkan berbagai sarana prasarana penunjang pembangunan daerah. Hal tersebut dilaksanakan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga saat ini masih belum maksimal direalisasikan.

b. Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kesenjangan sosial dalam masyarakat sangat terlihat pada masyarakat yang berada pada kategori miskin maupun keluarga pra sejahtera. Hal tersebut terlihat pada tahun 2016 dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Berau (5,37%) meningkat dari periode sebelumnya meskipun lebih rendah dari angka Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 6,11persen. Meskipun demikian, fenomena kenaikan angka kemiskinan ini harus selalu dipantau dan diminimalisir kembali guna menjalankan salah satu amanat pembangunan nasional untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.

c. Masih tingginya pengangguran

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Berau berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan masa produktif untuk mandiri secara ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang berkualitas akan meningkatkan akselerasi capaian pembangunan, namun sebaliknya, jika angkatan kerja yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah masih minim kualitasnya, maka akan timbul masalah. Permasalahan tersebut yang dialami oleh Kabupaten Berau saat ini dimana angkatan kerja sebagian besar hanya lulusan SD ke bawah.

Angka pengangguran Kabupaten Berau pada beberapa tahun ini masih cukup fluktuatif dimana sempat mencapai 10,05 persen pada tahun 2014 meskipun menurun kembali pada tahun berikutnya mencapai 5,72 persen. Namun dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, angka pengangguran ini masih cukup

tinggi sehingga perlu adanya penanganan khusus pada angkatan kerja di Kabupaten Berau untuk memiliki daya saing dalam kompetisi pasar kerja.

d. Pendapatan masyarakat yang belum merata

Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1 dimana angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis sedangkan angka 1 menunjukkan hal yang sebaliknya. Dilihat dari tabel indeks gini Kabupaten Berau, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Berau termasuk ketimpangan sedang karena masih di bawah angka 0,5. Indeks gini menurun dari angka 0,3305 di tahun 2013 ke angka 0,3204 di tahun 2014 yang berarti terjadi penurunan ketimpangan pada pemerataan pendapatan masyarakat.

Meskipun mengalami penurunan gini ratio, akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah lain masih termasuk pada ketimpangan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Berau harus merumuskan program pemerataan pendapatan masyarakat agar kesenjangan sosial menurun dan berusaha menstabilkan pemerataan pendapatan masyarakat dalam kualitas yang optimal.

e. Pertumbuhan perekonomian masih terpusat di perkotaan

Pemerataan pembangunan daerah akan sulit diimplementasikan, mengingat pergerakan perekonomian Kabupaten Berau terpusat pada wilayah perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata merupakan salah satu penyebab permasalahan tersebut timbul. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni Tanjung Redeb, sebesar 75.110 penduduk menjadi pusat perekonomian daerah sekaligus mendominasi kontribusi perekonomian daerah. Kegiatan perekonomian di daerah pedesaan belum mampu menggerakkan roda perekonomian secara masif pada masing-masing wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terlalu signifikan.

f. Perlambatan ekonomi hingga mencapai titik negatif

Sebagai salah satu wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam tergolong tinggi. Dalam pemberdayaan dan penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pergerakan perekonomian, pada tahun-tahun terakhir ini terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian daerah bahkan pada tahun 2016 mencapai titik -1,70 persen. Permasalahan yang cukup urgent inilah yang perlu diperhatikan khususnya bagi pengambil kebijakan untuk perbaikan perekonomian ke depan.

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Berau menurun secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun dimana pada tahun 2012 mencapai 15,47 persen

menjadi sebesar -1,70 persen pada tahun 2016. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh fluktuasi perekonomian global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan kontributor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Berau.

Jika dibandingkan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau merupakan pertumbuhan ekonomi paling rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota di sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.

g. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan

Kualitas sumber daya manusia akan selalu dihubungkan dengan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kabupaten Berau, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Berau antara lain menyangkut kualifikasi guru maupun tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan terutama di kawasan pedalaman, hingga sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 8,78 tahun pada tahun 2016, yang berarti penduduk Kabupaten Berau rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 8,78 tahun atau kelas 3 SMP semester kedua. Meskipun begitu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Berau masih berada jauh di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 9,24 tahun.

Dari segi harapan lama sekolah, angka harapan masyarakat usia masuk sekolah cukup tinggi pada lama jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Berau mencapai 13,18 tahun yang mengindikasikan bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13-14 tahun.

h. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan

Peran kesehatan menjadi vital, mengingat setiap orang memerlukan kondisi tubuh "sehat" guna memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan pemeratakan tenaga medis kewilayah pedalaman, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Angka harapan hidup di Kabupaten Berau yang cenderung naik perlahan pada tahun 2012 sebesar 71,10 tahun, meningkat menjadi 71,37 tahun pada tahun 2016. Meskipun angka ini cukup

tinggi, namun jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur (73,68 tahun) masih cukup tertinggal.

i. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*)

Kabupaten Berau termasuk daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan tersebut terletak baik di perairan maupun daratan. Keanekaragaman hayati flora dan fauna akuatik di Kabupaten Berau yang banyak dijumpai di perairan atau kawasan laut kepulauan Derawan meliputi mangrove, lamun (*seagrass-meadows*), terumbu karang, ikan karang, Cetacean dan Manta Rays (kelompok paus dan lumba-lumba), penyu, ubur-ubur, biota lainnya (*decapoda*, alga, plankton, *gastropoda*, bentik foraminifera).

Keanekaragaman hayati flora dan fauna daratan di Kabupaten Berau banyak dijumpai di hutan, dan hasil survei fauna darat menunjukkan telah ditemukan sebanyak 42 jenis mamalia, 108 jenis burung, 6 jenis reptil, 9 jenis amphibi, 35 jenis ikan air tawar dan 14 jenis nyamuk. Fauna mamalia terdiri dari 4 jenis primata, 10 jenis rodentia, 3 jenis tupai, 3 jenis kucing, 4 jenis tikus, 9 jenis kelelawar dan 9 jenis mamalia lainnya. Bekantan dan orang utan termasuk mamalia dan merupakan endemik Pulau Kalimantan, sedangkan 13 jenis mamalia yang termasuk kategori dilindungi, yaitu beruang madu, garangan, kancil, kukang, kijang kuning, kucing hutan, landak, macan dahan, musang hitam, muncak, pelanduk napu, rusa, dan trenggiling. Fauna burung (*avifauna*) diantaranya adalah beo atau tlung (*Gracula religiosa*), elang bondol (*Hallaster indus*), burung raja udang (*Alcedo meninting*) yang merupakan *avifauna* kategori dilindungi. Sedangkan reptil kategori dilindungi adalah ular sawa (*Phyton molurus*), dan 3 jenis amphibi.

Dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Berau, setiap aktivitas perekonomian mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan baik. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut menjadi terancam berbagai kelangsungan ekosistemnya terutama dari aktivitas pertambangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih lagi, pengembangan perkebunan sawit juga cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup harus terus digalakkan tanpa mengurangi porsi perekonomian daerah.

j. Residu aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan

Aktivitas pertambangan di Berau yang mempunyai potensi merusak lingkungan jika tidak diatur, diawasi dan dikelola dengan bijak. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini, usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat dapat merusak lingkungan.

k. Pencemaran air semakin meningkat

Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktifitas tambang yang tidak ramah lingkungan. Aktivitas tambang batubara di Indonesia khususnya Kabupaten Berau biasanya dilakukan dengan cara tambang terbuka, walaupun ada beberapa yang menggunakan tambang bawah tanah (*underground mining*), sehingga akan berdampak terhadap perubahan bentang alam, sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Dampak ini secara otomatis akan mengganggu ekosistem di atasnya, termasuk tata air (Subardja, 2007).



BAB 3

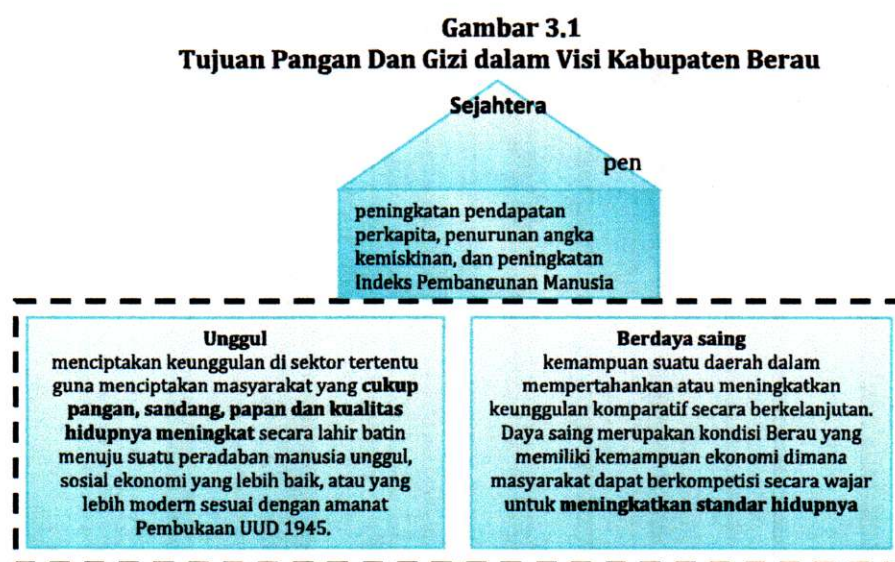
RENCANA AKSI MULTISEKTOR

3.1 TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan pendekatan multi-sektor adalah terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Selain itu diharapkan dengan disusunnya RAD PG ini menjamin kesediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Berau.

3.2 OUTCOME UTAMA, OUTPUT DAN INTERVENSI

Perbaikan pangan dan gizi bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Tujuan ini sesuai dengan Visi Kabupaten Berau sebagai berikut:



Sumber : RPJMD Kab. Berau Tahun 2016 - 2021

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 khususnya dalam bidang pangan dan gizi yaitu:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau



Tahun 2016 - 2021

Misi	Tujuan	Sasaran
"Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi"	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia,	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya usia harapan hidup

Sumber : RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, diperlukan tolok ukur berupa indikator terkait pangan dan gizi. Pada Tabel 3.2. ditampilkan indikator terkait pangan dan gizi yang merupakan amanat dari RPJMD dan Renstra Perangkat daerah yang terkait pangan dan gizi. Pencapaian target indikator tersebut juga memerlukan peran aktif dari multi sektor.

Tabel 3.2

Indikator dan Sasaran Pangan

No.	Indikator	Kondisi Awal (2016)	Target Akhir (2021)
1.	Produksi padi (ton)	31.000	47.715
2.	Produksi jagung (ton)	15.460	120.500
3.	Produksi kedelai (ton)	793,58	1200
4.	Produksi gula (ton)	90	150
5.	Produksi daging sapi (ton),	2.585	3.200
6.	Produksi ikan budidaya (ton)	2.202,3	2.312,31
7.	Produksi ikan tangkap (ton)	18.000,4	18.881,09
8.	Skor PPH	81,2	97
9.	Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.387	2.400
11.	Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	50,96	70

Tabel 3.3

Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi

No.	Indikator	Kondisi Awal (2016)	Target Akhir (2021)
1	Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)		
2.	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (persen)	4,4	3,3
3.	Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (persen)	31,3	75
4.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	8	6
5.	Prevalensi kurus (<i>wasting</i>) pada anak balita (persen)	9,2	2,5
6.	Prevalensi pendek dan sangat pendek (<i>stunting</i>) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (persen)	27,2	15
7.	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen)	4,3	3,5

3.3 Prinsip dan Pendekatan Kunci

3.3.1 Pendekatan Multi Sektor

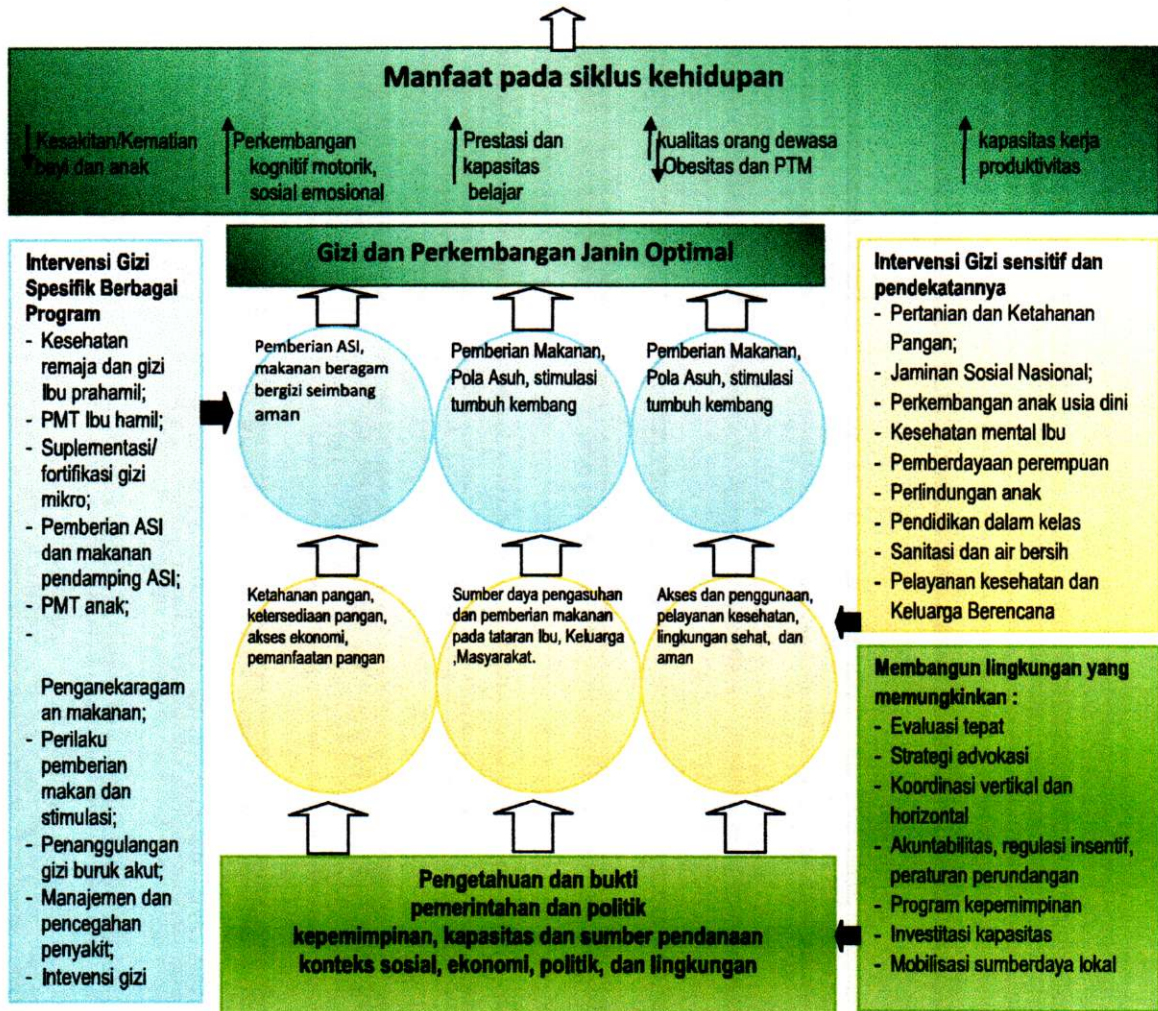


Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan, karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam stunting pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana. Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Semua perangkat daerah terkait mempunyai tujuan program multi-sektor yang sama yaitu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Diharapkan, semua perangkat daerah dapat mencapai semua *outcome* yang telah ditentukan. Seluruh *outcome* akan dapat dicapai setidaknya apabila 1) terjadi peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan pada remaja, wanita usia subur dan ibu; 2) konsumsi makanan yang berpedoman pada gizi seimbang terutama pada kelompok rentan yaitu kelompok 1000 HPK, remaja perempuan, ibu menyusui, dan balita; 3) pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang; 4) pencegahan dan manajemen penyakit infeksi; 5) penanggulangan gizi buruk akut; 6) ketersediaan pangan, akses ekonomi dan pemanfaatan pangan yang adekuat; 7) Jaminan terhadap akses kesehatan dan sosial; 8) Peningkatan sanitasi dan air bersih; 9) Akses terhadap pelayanan kesehatan dan KB; 10) Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini; 11) Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan advokasi yang strategis; 12) koordinasi vertikal dan horizontal; 13) Akuntabilitas, regulasi insentif, peraturan perundang-undangan; 14) investasi dan mobilisasi kapasitas; 15) Monitoring dan evaluasi tepat guna. Peran setiap perangkat daerah terkait dapat dijabarkan melalui pencapaian indikator *output*, seperti yang dicantumkan pada indikator input didalam *logframe* RAD-PG Tahun 2016-2021.

Gambar 3.2
Kerangka Pendekatan

PERBAIKAN KUALITAS SUMBER DAYA



Sumber: Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi

3.3.2 Sensitif Gender

a. Pelaksanaan Pengarusutamaan Pembangunan Gender

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berau membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG), merupakan gabungan lintas instansi di jajaran Pemkab Berau. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegritas prespektif gender. Menjadi satu dimensi yang integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dari program pembangunan. Sebagai pelaksanaan integrasi, PUG merupakan siklus perencanaan dan penganggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat bagi masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan Instruksi Presiden



Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan Nasional, serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan kebijakan PUG yang di antaranya dengan membentuk Pokja PUG. Pemkab telah melaksanakan kebijakan dan program responsif gender. Dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, maupun rencana strategis serta rencana kerja perangkat daerah. Selain itu, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dilakukan dengan analisis gender melalui RKA SKPD, serta melaksanakan sosialisasi PUH dan pelatihan sistem anggaran responsif gender. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan pembinaan kepada organisasi perempuan dalam peningkatan dan penguatan kapasitas organisasi. Melakukan fasilitasi pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

b. Kesenjangan Gender Dalam Hal Akses, Manfaat dan Partisipasi Dalam Pembangunan

Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakkan hak asasi manusia, penegakkan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan manusia, kesatuan ekologi, kesetaraan, dan keadilan sosial generasi saat ini dan dimasa mendatang (Munasinghe, 1992, Holdren et al, 1995, Campbell, 1996). Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

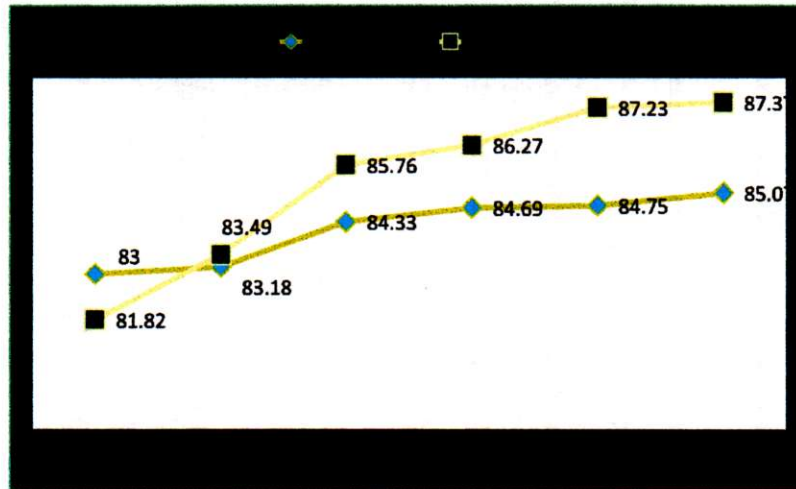
Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki.

Berikut pencapaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau dalam kurun waktu 2010 hingga 2015.

Gambar 3.3
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau Tahun 2010-2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, Kementerian PP dan PA dan BPS,

Capaian IPG Kabupaten Berau sejak Tahun 2011 hingga 2015 melampaui IPG Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan gender di Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka ini diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai indeks diatas 90. Indeks pembangunan gender yang meningkat mengindikasikan penurunan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketengakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan yang antara lain disebabkan oleh (1). berkurangnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya, (2). Peningkatan peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi, (3). Peningkatan kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.

3.3.3 Kesetaraan

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan



pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Program *Sustainable Development Goals*(SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB di New York, USA. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Adapun tujuan SDGs terkait kesetaraan adalah **mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.**

Tidak hanya memiliki peran domestik untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan juga sebagai penggerak roda pembangunan. Secara internal, kaum perempuan merupakan tiang keluarga yang juga sebagai penentu kualitas generasi penerus bangsa. Peran perempuan dalam pembangunan tidaklah diragukan. Pada level rumah tangga, perempuan berkontribusi dalam hal manajemen rumah tangga, perawatan kesehatan anggota keluarga (anak-anak dan orang tua) dan pendidikan anak (UNDP, 1996). Perempuan juga dianggap sebagai alokator pendapatan dan pengambil kebijakan dalam distribusi pengeluaran (Boozer, Ranis, Stewart, & Suri, 2003). Di samping itu, perempuan, khususnya Ibu rumah tangga, merupakan penentu utama pemilihan, penyiapan dan alokasi pangan. Budaya konsumsi termasuk nilai-nilai sosial dan kebiasaan terkait dengan pola diet, penyiapan pangan, dan asupan gizi keluarga ada di tangan perempuan (BPS, 2015a).

Kabupaten Berau merupakan daerah yang berpotensi untuk berkembang, terutama ditunjang dengan perkembangan Indeks Pembangunan Gender yang meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mendukung kesetaraan gender Kabupaten Berau memiliki program-program terkait yang tercantum dalam perencanaan pembangunan, antara lain:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
- 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
- 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

3.3.4 Keselarasan Dengan RPJMD Kabupaten Berau 2016 -2021

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:



MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN

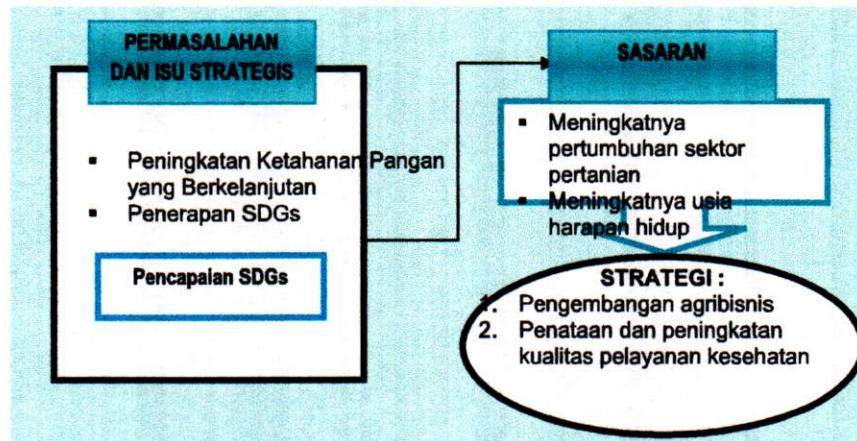
Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

- (1) Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
- (3) Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
- (4) Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau yang terkait pangan, pada misi kedua **"Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal"**. Sedangkan pada misi keempat terkait dengan sumber daya manusia, **"Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi."**

Berdasarkan misi ketiga dan keempat RPJMD Kabupaten Berau, maka strategi pembangunan daerah yang terkait dengan upaya peningkatan pangan dan gizi adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.4
Strategi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021
Terkait Peningkatan Pangan dan Gizi



Penjelasan masing-masing strategi, sebagai berikut:

1. Pengembangan agribisnis

Sebagai bagian dari negara agraris, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Berau. Walaupun masih besar, namun, persentase jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penyebab utama merosotnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian adalah terlalu kecilnya pendapatan dari pekerjaan sebagai petani. Rendahnya pendapatan petani juga terkait erat dengan kepemilikan lahan petani. Dengan rendahnya pendapatan di sektor pertanian, perpindahan profesi dari sektor pertanian ke sektor lainnya, terutama ke sektor industri tidak bisa terhindarkan lagi. Masyarakat memilih bekerja di sektor yang memberikan penghasilan besar. Merosotnya persentase tenaga kerja di sektor Pertanian harus segera ditanggapi serius oleh pemerintah daerah dengan kebijakan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan petani seperti mengembangkan bantuan permodalan dan penerapan manajemen teknologi pertanian.

Upaya tersebut harus diikuti dengan upaya perbaikan di sektor pasca panen. Petani sering kali tidak mendapatkan harga jual yang baik di saat panen tiba. Karena itu, pemerintah akan menjamin hasil panen bisa terserap dengan baik dan dengan harga yang menguntungkan. Peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terjun ke sektor itu.

2. Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Disamping pembangunan dimensi pendidikan pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk